

# PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGRO-INDUSTRI DI INDONESIA

Oleh  
Menteri Muda Pertanian

BUN / 2004

J



BADAN DIKLAT PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
1992



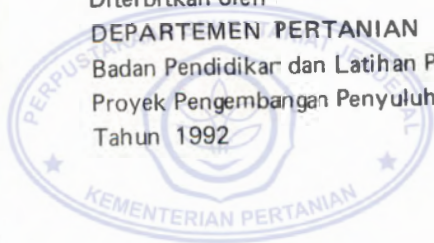
Diterbitkan oleh

**DEPARTEMEN PERTANIAN**

Badan Pendidik dan Latihan Pertanian

Proyek Pengembangan Penyuluhan Pertanian Pusat (NAEP III)

Tahun 1992



*Budi R...*  
27.

# PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN AGRO-INDUSTRI DI INDONESIA



Oleh  
**Menteri Muda Pertanian**



**BADAN DIKLAT PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
1992**



*Handwritten signature*

REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND ANIMAL INDUSTRY



Minister of Agriculture and Animal Industry





**Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah**  
**Menteri Muda Pertanian RI**





## KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Nasional ialah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam kaitan itu, maka tujuan Pembangunan Pertanian sebagai sub-sistem Pembangunan Nasional ialah meningkatkan produksi pertanian secara terus menerus guna :

- (1) memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung selalu meningkat;
- (2) memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri dalam negeri yang terus berkembang;
- (3) meningkatkan devisa dari ekspor hasil-hasil pertanian ke luar negeri.

Disamping itu Pembangunan Pertanian juga harus dapat menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, mendorong pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha dan mendukung pembangunan daerah dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.

Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua (Bangkajang II) telah terjadi transformasi perekonomian nasional yang membawa perubahan pada ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian dan pada petani nelayannya. Pemanfaatan teknologi maju di sektor pertanian semakin meluas, demikian juga produktifitas usahatani semakin meningkat dan diversifikasi usahatani semakin beragam. Kualitas sumber daya manusia petaninya juga sudah jauh lebih baik. Hal ini ditunjukkan adanya indikasi semakin banyaknya petani yang mulai beralih orientasi usahatannya dari usahatani subsisten ke usahatani komersial dan dari cara usahatani tradisional ke arah usahatani dengan teknologi modern.

Dalam kaitan itu, peran sektor pertanian dalam Bangkajang II harus dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ke-



sempatan kerja dan kesempatan berusaha, khususnya di pedesaan. Kesempatan kerja dimaksud tidaklah harus selalu di sektor pertanian melainkan juga di bidang perekonomian lainnya yang mempunyai keterkaitan erat dengan pertanian.

Juga dalam hal penerimaan devisa, kontribusi nilai ekspor pertanian primer mungkin saja menurun, namun di lain pihak kontribusi nilai eksport industri berbahan baku pertanian atau yang terkait erat dengan pertanian harus dapat meningkat. Untuk itu corak usaha yang cocok dikembangkan dalam mencapai tujuan tersebut adalah mengembangkan usahatani yang berorientasi pada agribisnis dan mendorong tumbuh dan berkembangnya agro-industri.

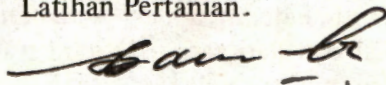
Dalam upaya ke arah itu, perlu adanya pemahaman yang sebaik-baiknya mengenai agribisnis dan agro-industri oleh semua pelaku-pelaku Pembangunan Pertanian yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan agribisnis dan agro-industri.

Buku ini merupakan kumpulan ceramah/pengarahan Menteri Muda Pertanian Bapak Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah tentang agribisnis dan agro-industri. Diharapkan dapat memperluas wawasan dan dapat dipakai sebagai acuan dalam ikut serta mengembangkan agribisnis dan agro-industri di Indonesia.

Umpan balik dari para pembaca dalam upaya mengembangkan agribisnis dan agro-industri secara optimal sangat diharapkan.

Terima kasih.

Jakarta, 2 Februari 1992  
Kepala Badan Pendidikan dan  
Latihan Pertanian.



Ir. Syamsuddin Abbas  
NIP. 080015407



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
PERANAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS DALAM PEM- BANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN .....	3
PENGANTAR DISKUSI MENGENAI RENCANA PEM- BANGUNAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KEDUA .....	29
PENGARAHAN MENTERI MUDA PERTANIAN DALAM RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN PERTANIAN TANGGAL, 3 – 7 FEBRUARI 1992 .....	45
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BAGI PEDESAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN AGRO-INDUSTRI .....	67





**PERANAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS  
DALAM PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN**

**DEPARTEMEN PERTANIAN**

**1992**



REKAM DOKUMEN  
KEMENTERIAN PERTANIAN



# PERANAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah  
Menteri Muda Pertanian

## Pendahuluan

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Peran tersebut pada Pelita I cukup dominan, terutama dalam hal sumbangan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja dan devisa negara. Peran tersebut walaupun akan terus menurun sejalan dengan makin berkembangnya dan berimbangnya perekonomian nasional, namun secara absolut diharapkan akan terus meningkat. Sektor pertanian selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal peningkatan produksi bagi penyediaan pangan dan bahan baku industri, peningkatan ekspor serta peningkatan pendapatan petani.

Jika dilihat pembangunan jangka panjang tahap pertama, pada empat Pelita pertama (Pelita I, II, III dan IV) titik berat pembangunan ekonomi dilakukan pada sektor pertanian, sementara sektor industri berevolusi dari sektor yang mendukung pertanian sampai mencapai sektor yang lebih mapan yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dalam era pelita V ini, struktur ekonomi diharapkan sudah dapat mencapai tahap yang lebih berimbang, yaitu adanya kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

Pada tahap-tahap pembangunan yang akan datang, sektor pertanian sebagai sektor pendukung diharapkan masih akan memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Nasional. Dampak dari globalisasi ekonomi yang semakin meluas, misalnya, akan terus menuntut kita untuk mempertanggung sektor pertanian dari berbagai aspek. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan beberapa penanganan



yang sistematis, baik di bidang produksi maupun pemasarannya. Pelaksanaan diversifikasi yang terarah, pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan efisiensi merupakan alternatif kebijaksanaan yang perlu mendapatkan pengkajian secara mendalam dan terus menerus.

Dalam makalah ini, disajikan alternatif pemikiran strategis pembangunan sektor pertanian pada era tinggal landas. Di samping itu dalam makalah ini akan diungkapkan pula potensi, tantangan, dan arah yang dihadapi sektor pertanian pada masa yang akan datang. Makalah diakhiri dengan pembahasan mengenai peran dan prospek serta permasalahan agribisnis dalam era agro-industrialisasi.

## **POTENSI SEKTOR PERTANIAN DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI**

### **A. Faktor Internal**

#### **1. Kondisi Sumber Daya Alam**

Sumberdaya alam yang sangat mendukung sektor pertanian adalah lahan. Dari 191,9 juta hektar luas daratan Indonesia, seluas 133,7 juta atau 69,7 persen secara fisik mempunyai daya dukung yang memungkinkan untuk budidaya pertanian, yaitu pada lahan dengan kelas kemampuan I s/d IV. Seluas 22,4 juta hektar di antaranya diidentifikasi sebagai lahan yang cocok untuk budi daya pertanian tanaman pangan. Sebaran dari potensi lahan tersebut mencakup 8,6 persen di Jawa, Madura dan Bali, sedangkan sisanya di luar Jawa. Tingkat penggunaan lahan ditinjau dari segi luas penggunaannya diungkapkan bahwa untuk pulau Jawa 84 persen dari lahan kelas I s/d kelas IV telah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, sedangkan di luar Jawa pemanfaatan lahan untuk pertanian baru mencapai 22 persen dari potensi yang tersedia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain juga terjadi adanya penurunan kualitas daya dukung lahan-lahan pertanian, khususnya lahan kering di daerah beriklim kering dan pada lahan kering dengan kelerengan yang cukup besar masih terus berlangsung. Diperkirakan sekitar 6



juta hektar lahan di luar kawasan hutan pada saat ini dikategorikan mempunyai kondisi kritis dan semi kritis. Dalam upaya pemanfaatan sumberdaya lahan ini, di samping kita akan terus mengoptimalkan potensi yang ada, juga akan dilakukan upaya-upaya perbaikan lahan kritis. Dalam hal ini sub sektor perkebunan yang mengusahakan tanaman keras mempunyai kemampuan selain memproduksi hasil perkebunan juga berperan dalam pelestarian sumberdaya alam. Sejak pertengahan Pelita IV telah dirintis pengembangan perkebunan di daerah kritis seperti PIR lokal kakao di Wonogiri dan PIR lokal Danau Di Atas di Propinsi Sumatera Barat, PIR lokal Parsoburan di Sumatera Utara serta pengembangan kakao di Gunung Kidul.

Sumberdaya perairan umum yang sesuai saat ini adalah kurang lebih 14 juta hektar, yang terdiri atas 11,95 juta hektar sungai, rawa dan lebak lebung; 1,78 hektar danau alam dan 0,03 hektar waduk. Jenis ikan yang ada diperkirakan lebih 600 species. Pemanfaatan perairan umum dilakukan dengan cara penangkapan ikan dan budidaya. Dari perkiraan potensi lestari sebesar 590 ribu ton per tahun tingkat pemanfaatan baru sekitar 46 persen. Sedangkan potensi produksi perairan laut teritorial diperkirakan kurang lebih 4,4 juta ton per tahun dan sekitar 2 juta per tahun untuk potensi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tingkat pemanfaatan perairan laut teritorial baru sebesar kurang lebih 40 persen dari potensi yang ada, sedangkan pemanfaatan ZEE baru mencapai kurang lebih 24 persen dari potensinya. Walaupun diakui bahwa pada beberapa wilayah perairan pantai sudah memberikan tekanan yang tinggi terhadap sumberdaya. Di selat Malaka misalnya, tingkat penangkapan sudah melewati potensi lestari perairan yang bersangkutan. Demikian pula perairan laut Jawa dan Bali telah pula mengalami tekanan yang tinggi. Namun secara umum potensi sumber laut yang tersedia masih jauh di atas tingkat pemanfaatannya.

## 2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Dengan proporsi penduduk yang bermata pencaharian utama sebagai petani yang cukup besar, Indonesia termasuk ke da-



lam kelompok negara yang pada tahap awal pembangunan perekonomian nasionalnya tertumpu pada sektor pertanian. Petani sebagai bagian terbesar penduduk pedesaan merupakan faktor penentu dan ujung tombak dalam mensukseskan pembangunan, karena merekalah yang pada akhirnya harus menetapkan keputusan dalam kegiatan usaha-taninya. Namun potensi sumberdaya manusia yang besar tersebut, tidak diikuti oleh tingkat kualitas yang memadai. Data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian paling tinggi tamat Sekolah Dasar dengan tingkat keterampilan yang relatif rendah. Implikasinya adalah rata-rata tingkat upah yang mereka terima relatif rendah dibandingkan dengan tingkat upah yang diterima petani di negara tetangga. Rendahnya tingkat upah ini janganlah diartikan sebagai suatu keunggulan komparatif, namun sebaliknya kondisi yang demikian justru merupakan kelemahan kita khususnya di sektor pertanian, karena hal ini merupakan salah satu indikasi dari kemiskinan.

Dampak dari kondisi di atas, sangat dirasakan dalam perkembangan terakhir ini yang menunjukkan adanya kecenderungan keengganan angkatan muda, terutama yang berpendidikan, untuk bekerja di sektor pertanian. Hal ini mungkin disebabkan oleh citra kerja di pertanian yang dianggapnya lebih rendah karena melelahkan dan produktivitasnya rendah. Walaupun ini merupakan gejala alur transformasi struktural yang wajar di dalam proses pembangunan, namun yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk lebih ditingkatkan produktivitasnya melalui pembinaan petani serta kelembagaannya, sehingga para petani benar-benar dapat berperan sebagai subyek pembangunan ekonomi nasional, khususnya di pedesaan yang secara terus menerus dapat meningkatkan kesejahteraannya, menjadikan mereka sebagai petani yang tangguh.

### 3. Kondisi Kelembagaan Petani

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari



faktor manusia dan kelembagaan yang merupakan pelaku dan wahana di dalam kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan tani sebagai salah satu wadah pembangunan pertanian peranannya sangat strategis baik sebagai alur penghubung antara lembaga di atasnya dengan petani maupun sebagai media di dalam mempercepat proses transfer teknologi dan informasi. Salah satu permasalahan utama yang kita hadapi saat ini adalah lemahnya "bargaining position" para petani. Pemasaran hasil-hasil pertanian terutama palawija dan hortikultura, masih dihadapkan pada masalah pokok seperti skala usaha kecil, terpecahnya kegiatan produksi, tingginya biaya pengangkutan, belum memadai perkembangan industri pengolahan dan masih lemahnya informasi pasar. Kesemuanya itu menyebabkan kurang efisiennya sistem pemasaran yang ada, yang pada gilirannya menyebabkan tingginya biaya pemasaran dan rendahnya harga yang diterima oleh petani. Peluang untuk mengatasi hambatan ini antara lain adalah dengan pengembangan kelembagaan melalui pendekatan secara sistem komoditas terpadu dalam bentuk pola PIR, perusahaan pembina, perusahaan penghela serta bapak angkat.

Dalam menghadapi masalah skala usaha, kerjasama petani dalam kelompok sehamparan sebagai salah satu pola dasar yang telah dikembangkan, merupakan suatu potensi yang perlu terus dimanfaatkan dan dikembangkan. Di bidang pangan, khususnya beras pemekaran skala produksi lewat kerjasama kelompok tani sehamparan telah memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian swasembada pangan. Apabila kerjasama itu dapat dikembangkan sehingga mencakup keterampilan manajerial, maka pola ini dapat diketengahkan untuk mengembangkan keterkaitan pertanian dengan industri dan perdagangan. Dalam hal kelompok tani sehamparan ini dapat diandalkan untuk bertindak sebagai pelaku pertanian berhadapan dan bekerja sama dengan koperasi dan pengusaha dalam mengembangkan agribisnis dan agro-industri.

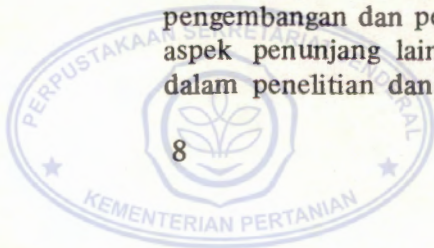


## B. Faktor Eksternal

Abad ke-20 ini telah ditandai oleh berbagai pergerakan dan perubahan geopolitik yang tidak mudah, diramalkan arah maupun dampaknya. Sebagai akibat struktur perekonomian yang semakin global yaitu kian menyatu, berbagai pergerakan dan perubahan tersebut secara langsung menimbulkan ketidak-pastian dan ketidak stabilan perekonomian internasional. Phenomena globalisasi berkembang selaras dengan melajunya teknologi informasi dan transportasi, sehingga semakin mengaburkan batas-batas antar bangsa. Gejala penyatuan perekonomian dunia memungkinkan ditransmisikannya dengan sangat cepat gejala-gejala di pasaran internasional kepada perekonomian nasional melalui arus perdagangan, finansial maupun investasi. Sebagai akibat dari perkembangan ini semakin banyak negara, baik dari utara dan selatan, maupun negara-negara maju dan yang sedang berkembang, mencari mekanisme yang lebih pragmatis untuk memanfaatkannya globalisasi seoptimal mungkin guna memacu pembangunan ekonomi nasionalnya masing-masing.

Perkembangan situasi perekonomian dunia tersebut dapat berdampak positif maupun negatif terhadap sektor pertanian. Jika kita tidak segera tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi termasuk di dalamnya proses globalisasi, kemungkinan besar kita tidak akan dapat menghindari secara dini dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan tersebut ataupun kita tidak akan mampu meraih manfaat positif dari padanya. Kemampuan kita untuk memberikan respon yang tepat pada saatnya bergantung kepada bagaimana upaya kita selama ini di dalam mempersiapkan diri menyongsong perubahan-perubahan yang fundamental dimaksud.

Untuk dapat menangkap setiap peluang sebagai dampak dari perubahan-perubahan tersebut, maka kita harus sedini mungkin mempersiapkan diri untuk melakukan setiap kemungkinan yang bisa kita kembangkan, mulai dari aspek penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi sampai kepada aspek-aspek penunjang lainnya. Dalam pada itu, pendekatan dasar dalam penelitian dan pengembangan pertanian harus dilandasi



oleh ketepatan teknologi yang mencakup asas-asas berikut: (a) dari segi ekonomi, teknologi harus menguntungkan; (b) dari segi sosial, teknologi harus dapat diterima masyarakat; (c) dari segi lingkungan, teknologi harus tidak meruak dan harus melestarikan lingkungan; dan (d) dari aspek ketenaga kerjaan maka teknologi hendaknya meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja.

Apabila memang dipandang perlu untuk diterapkan teknologi maju dalam usaha pertanian, maka teknologi tersebut harus mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, baik efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis. Untuk mencapai usahatani yang efisien tentunya harus diterapkan penggunaan faktor-faktor produksi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian yang tinggi dengan biaya yang relatif murah dan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Usaha menciptakan teknologi pertanian yang memperhitungkan aspek efisiensi penggunaan semua faktor produksi ini merupakan suatu keharusan bagi terwujudnya suatu sistem pertanian yang tangguh dan mandiri, sehingga ia akan mampu menghadapi gejala perkembangan pasar. Untuk mencapai semua persyaratan tersebut, maka penelitian dan pengembangan perlu terus ditingkatkan, di samping upaya penyuluhan terhadap petani agar mampu menerapkan teknologi tersebut dan mengambil manfaat semaksimal mungkin. Untuk itu, ia harus ditunjang oleh suatu sistem penyuluhan yang tepat.

## **TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI.**

### **a. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk**

Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia telah menurun dari 2,27 persen menjadi 1,96 persen, namun penyebarannya kurang seimbang. Jumlah penduduk sampai akhir Pelita V (1993) diperkirakan akan berkembang menjadi 192,9



juta jiwa, dan pada tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 216,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 58,1% akan bermukim di Jawa, sisanya sebesar 41,9% diperkirakan akan bermukim di luar Jawa. Komposisi penduduk dari segi jenis kelamin dalam era tersebut relatif seimbang. Tetapi dari segi susunan tingkat usia atau angkatan kerja tidaklah demikian. Sebab jumlah yang terbanyak di antara angkatan kerja terletak pada tingkat usia 10 – 24 tahun. Kelompok ini mencapai sekitar 33% dari seluruh angkatan kerja. Dari golongan ini sebagian besar bermukim di kota bukan di pedesaan, sehingga menimbulkan "urban underemployed".

Penyebaran penduduk masih tetap merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Data tahun 1990 menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi masih terdapat di Jawa dengan tingkat kepadatan sebesar 826 jiwa per Km. Tingkat kepadatan ini jauh di atas tingkat kepadatan di wilayah lainnya, seperti Sumatera dengan tingkat kepadatan 80 jiwa per Km, Sulawesi 67 jiwa per Km, Kalimantan 17 jiwa per Km, dan wilayah lainnya sebesar 24 jiwa per Km.

#### **b. Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Walaupun secara riil Indonesia masih merupakan negara dengan pendapatan perkapita yang rendah di Asia Tenggara, namun secara potensial Indonesia adalah negara yang paling kaya akan sumber daya alam. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan kelestarian sumber daya tersebut, termasuk ke dalamnya memperluas resource base dari sumber daya alam dimaksud dan pemanfaatannya secara optimal. Dalam kaitannya dengan hal ini, pemanfaatan sumber daya alam seyogyanya didasarkan atas beberapa faktor, seperti kemampuan/kesesuaian alami dari sumber daya (tanah, iklim, dsb.), kemampuan wilayah mengadaptasi teknologi secara tepat guna, dan ketersediaan sarana dan prasarana.



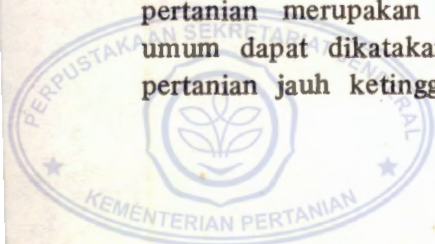
### c. **Rekayasa Teknologi dan Peningkatan Efisiensi.**

Perkembangan teknologi dunia di segala bidang termasuk pertanian di dalamnya sangat pesat. Sementara itu, apabila negara kita ingin dapat bersaing dalam bidang industri dan ekspor Pertanian di pasar internasional, maka kita harus mampu menciptakan paket teknologi yang memungkinkan terciptanya "sustained comparative advantage". Paket teknologi seperti ini perlu pula dikembangkan untuk mengakomodasi permintaan domestik akan produk-produk pertanian yang terus meningkat sebagai akibat peningkatan penduduk dan daya beli masyarakat.

Sedangkan tantangan dari Peningkatan efisiensi produksi erat kaitannya dengan pemanfaatan asas skala usaha. Pada saat ini proses produksi pertanian dinilai kurang efisien karena diusahakan pada luasan atau skala kecil. Beberapa upaya untuk membebaskan diri dari kendala ini yang telah dilakukan adalah melalui pendekatan PIR, pendekatan kerja sama kelompok sehamparan seperti program Insus dan SUPRAINSUS, maupun pendekatan Bapak Angkat. Namun hal ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut terutama pada tingkat aplikasinya di lapangan.

### d. **Pembinaan Pembangunan dan Investasi.**

Untuk mencapai tujuan strategis pembangunan nasional, yaitu perluasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan, diperlukan pula peningkatan investasi. Secara umum, pengeluaran investasi diperoleh dari tiga sumber, yaitu: (1) tabungan pemerintah, (2) tabungan masyarakat, dan (3) dana dari luar negeri. Pembentukan permodalan yang bersumber dari masyarakat guna membiayai pembangunan sektor pertanian merupakan tantangan yang cukup berat. Secara umum dapat dikatakan bahwa penanaman modal di bidang pertanian jauh ketinggalan dibandingkan dengan penanaman



modal di sektor manufaktur dan jasa. Hal ini disebabkan investasi di sektor pertanian pada umumnya mempunyai resiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan resiko penanaman modal di bidang industri dan jasa. Resiko tidak hanya timbul karena gejolak harga produk pertanian, akan tetapi juga dari proses produksi yang masih tergantung pada iklim. Walaupun teknologi telah banyak membantu mengurangi resiko itu, khususnya dalam perlindungan terhadap hama dan penyakit, tetapi iklim tetap merupakan faktor ekstrim yang tak terkendali. Tempo dan irama alamiah tidak dapat diubah terlalu banyak, sehingga jangka waktu tanaman belum menghasilkan (TBM) dan sifat musiman selalu harus diperhitungkan oleh penanam modal.

Aspek lain yang tampaknya ikut memperlambat laju penanaman modal di sektor pertanian adalah keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Kebanyakan produk, pertama cepat membusuk dan bervolume besar dibandingkan nilainya. Penanganan pasca panen, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan lancarnya pemasaran menjadi sangat penting. Apabila penanaman modal tidak mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya, ia harus tergantung kepada adanya investasi lain yang menjamin hadirnya semua mata rantai yang diperlukan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik. Sejalan dengan sasaran pemerintah bahwa pada era agro-industrialisasi nanti, sumber dana investasi berasal dari sektor swasta, maka pihak swasta diharapkan lebih berperan aktif dalam menanamkan modalnya di sektor pertanian.

#### e. Pemerataan dan Kesenjangan Sosial.

Secara umum, pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa berbagai kesenjangan telah dapat diatasi. Beberapa hal yang terkait dengan kesenjangan berikut kemungkinan penyebabnya dapat kita ungkapkan.



Seperti telah diketahui bersama, gambaran saat ini menunjukkan bahwa sekitar 80 persen dari penduduk Indonesia berada di pedesaan, lebih dari 54 persen di antaranya bekerja di sektor pertanian dengan rata-rata tingkat pendapatan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang berada di perkotaan. Berdasarkan harga yang berlaku pada tahun 1988, PDB rata-rata per tenaga kerja di sektor pertanian baru mencapai Rp.860.000,00, sedangkan di sektor industri telah mencapai Rp.4.300.000,00 atau perbandingan sekitar 1 : 5.

Sebab-sebab utama dari masih rendahnya pendapatan penduduk pedesaan, terutama yang bekerja di sektor pertanian adalah pola produksi yang masih terkekang oleh skala usaha sangat sempit, kurangnya investasi, dan prasarana fisik dan non fisik yang masih belum memadai.

Selain aspek-aspek tersebut, faktor lain yang juga memberikan andil dalam memperlebar kesenjangan baik antar wilayah maupun di antara masyarakat pedesaan, yaitu: Pertama, apa yang kita sebut dengan kegagalan pasar. Dari pengalaman selama ini, dapat ditunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang mengandalkan pada kekuatan pasar, ternyata proporsi tersebar dari manfaat yang ditimbulkannya justru dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Masyarakat ekonomi lemah, termasuk didalamnya petani kecil, dalam sistem ini hampir tidak terjangkau sama sekali. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka dalam menangkap sinyal-sinyal pasar yang ada. Apabila hal ini terus berlanjut, tentunya akan makin memperlebar kesenjangan di antara masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Kedua, kebijaksanaan yang cenderung bersifat uniform. Seperti kita ketahui, bahwa negara kita merupakan negara kepulauan yang mempunyai keragaman yang tinggi dalam berbagai hal termasuk di dalamnya sumberdaya. Penyamarataan kebijaksanaan pembangunan, baik regional maupun sektoral, tanpa memperhatikan keragaman di atas, akan menghasilkan respon yang berbeda antara pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah, ataupun daerah yang kaya sumberdaya alam dan prasarana



dengan daerah yang miskin. Apabila kebijaksanaan uniform ini terus dipertahankan, dikhawatirkan dapat memperlebar ketimpangan antara desa dengan kota, atau antara wilayah yang kaya sumberdaya alam dan fasilitas dengan wilayah yang miskin sumberdaya alam dan kurang fasilitas atau daerah terbelakang.

## **ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI**

### **a. Penyediaan Pangan**

Mempertahankan swasembada beras berarti mengupayakan peningkatan produksi beras pada tingkat tertentu setiap tahun secara berkesinambungan, yaitu minimal sama dengan pertumbuhan konsumsi yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Dalam Pelita V jumlah penduduk diperkirakan tumbuh dengan 1,9 persen/tahun. Ditambah dengan peningkatan pendapatan per kapita yang menyebabkan peningkatan konsumsi beras perkapita, maka pada Pelita V diharapkan produksi padi meningkat sebesar 3,2 persen/tahun. Harus diakui bahwa mempertahankan swasembada beras ini makin lama makin sulit. Dua variabel yang mempengaruhi produksi yaitu luas panen dan produktivitas (hasil/ha) sudah semakin sulit untuk dipacu peningkatannya.

Selain penyediaan pangan karbohidrat, pengadaan pangan protein merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka penyediaan pangan dengan kandungan nutrisi yang lebih seimbang. Pada Pelita IV konsumsi per kapita pangan protein hewani tumbuh lebih cepat dibandingkan konsumsi karbohidrat. Program penyediaan pangan nasional, memperkirakan bahwa konsumsi per kapita daging, telur, susu dan ikan tumbuh dengan laju masing-masing 8,4 persen, 8,7 persen, 3,2 persen dan 5,5 persen/tahun.

### **b. Dukungan Kepada Sektor Industri**

Sebagian dari sektor industri yang relatif padat modal bergantung pada sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku.



Karena itu, produksi beberapa komoditi pertanian, misalnya komoditi perkebunan, dituntut untuk meningkat dengan pertumbuhan yang cepat. Untuk dapat mendukung jenis industri ini, komoditi pertanian yang dihasilkan haruslah memenuhi syarat antara lain dari segi kuantitas tersedia secara kontinu dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan dari segi kualitas tersedia secara konsisten sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan industri. Agar sektor pertanian secara berkesinambungan dapat menyumbang secara optimal kepada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petani, upaya diversifikasi untuk mencari sumber pertumbuhan baru dan pengembangan agro-industri untuk meraih nilai tambah yang lebih besar dapat menjadi pilihan strategis guna mencapai sasaran pertumbuhan perekonomian secara merata.

Seperti diketahui, bahwa pengembangan diversifikasi vertikal bertujuan untuk memperkenalkan tambahan kegiatan atau perlakuan terhadap komoditas setelah dipanen. Dengan demikian para petani/pedesaan yang bersangkutan dapat memperoleh nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini (penyimpanan, pengeringan, pengolahan, pengangkutan dan seterusnya), maka nilai tambah yang semula dinikmati oleh pihak lain (prosesor, pedagang) berangsur-angsur akan beralih kepada petani produsen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pendapatan petani dapat ditingkatkan.

Lebih lanjut, agar pengembangan agro-industri tersebut dapat meraih manfaat yang optimal, maka dalam pengembangannya perlu didasarkan atas keunggulan komparatif yang dimiliki, karena ini akan menjamin pasar untuk produk yang dihasilkan. Untuk itu perlu diteliti secara seksama dimana letak keunggulan komparatif tersebut dalam bentuk apa. Keunggulan tersebut perlu pula dikaji dari waktu ke waktu karena keunggulan ini berubah dengan adanya perubahan teknologi, struktur ekonomi, struktur pasar internasional dan sebagainya.

Selain pengembangan industri padat modal atau yang menggunakan teknologi canggih tersebut di atas, pilihan strategi lainnya untuk pencapaian pertumbuhan perekonomian Indone-



sia yang diinginkan adalah pengembangan agro-industri di pedesaan. Pengembangan agro-industri ini selain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani.

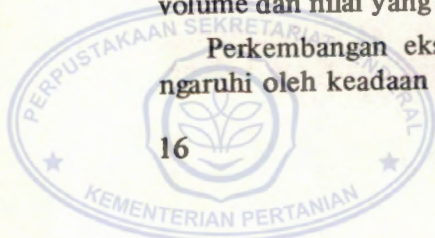
Untuk dapat memberikan dukungan yang penuh terhadap perkembangan agro-industri di pedesaan, kendala-kendala yang masih melekat pada sektor pertanian harus segera dapat diatasi. Kendala tersebut antara lain adalah masih tersebarunya usaha tani skala kecil sehingga menyulitkan penanganan pasca panen, masih beragamnya kualitas bahan baku yang dihasilkan, dan jumlah produksi acap kali berfluktuasi secara tajam sehingga kontinuitas proses produksi di sektor industri terganggu. Selain itu pembentukan modal dalam masyarakat pedesaan untuk membiayai pengembangan agro-industri masih terbatas.

Dengan demikian, agro-industri yang dikembangkan di pedesaan perlu berpijak di atas: (1) prinsip keunggulan komparatif; (2) tingkat keterampilan masyarakat dalam memantapkan jenis industri pengolahan yang telah dikenal lingkungannya; (3) tersedianya bahan baku yang berkesinambungan; (4) tersedianya fasilitas kredit dengan bunga ringan bagi masyarakat pedesaan; dan (5) tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan di pedesaan.

### c. Dukungan Pada Peningkatan Ekspor.

Setelah mengalami masa-masa sulit sebagai akibat kurangnya penerimaan dari ekspor minyak bumi secara drastis, maka upaya peningkatan ekspor non migas menjadi salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam memantapkan ketangguhan perekonomian nasional. Ekspor pertanian sebagian besar berasal dari subsektor perkebunan dan perikanan, diantaranya komoditi karet, kopi, teh, sawit, udang, tuna dan cakalang. Beberapa komoditi dari subsektor pangan dan peternakan juga turut diekspor, seperti gapek, jagung, dan kulit ternak; namun masih dalam volume dan nilai yang relatif rendah.

Perkembangan ekspor komoditi pertanian Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional, baik dari sisi permin-



taan maupun dari sisi persaingan negara pemasok lainnya; Karena itu, dukungan sektor pertanian terhadap kegiatan ekspor tidak cukup dipandang dilihat dari sisi peningkatan produksi domestik saja tetapi sisi perkembangan pasar internasional perlu senantiasa turut diperhatikan. Pengembangan ekspor komoditi pertanian harus dilihat tidak hanya dalam peningkatan volume dan nilainya saja. Reorientasi dalam pengembangan ekspor komoditi pertanianpun perlu dilakukan, yang dapat mencakup berbagai aspek.

Pertama, ekspor komoditi pertanian harus dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut. Selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada ekspor bahan mentah. Dengan mengembangkan teknologi pengolahan, baik yang berskala besar maupun yang mempergunakan teknologi pengolahan yang tepat guna bagi industri kecil di pedesaan, maka akan tercipta mata rantai industri pengolahan di dalam negeri yang dapat memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan nilai tambah, pendapatan petani, nelayan dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, ekspor komoditi pertanian diarahkan pada barang setengah jadi dan barang jadi.

Kedua, peningkatan ekspor komoditi pertanian perlu juga dicapai melalui diversifikasi komoditi ekspor. Saat ini ekspor komoditi pertanian tertumpu pada beberapa komoditi tertentu saja. Dengan diversifikasi komoditi, mata dagangan ekspor komoditi pertanian diperluas, baik dengan munculnya komoditi baru yang selama ini belum dikembangkan maupun dengan menganeekaragamkan jenis produk-produk ekspor dalam satu bentuk mata dagangan saja, yaitu bahan mentah.

Ketiga, peningkatan ekspor komoditi perlu disertai dengan pengembangan diversifikasi pasar ekspor. Sampai saat ini hampir semua ekspor komoditi pertanian andalan ditujukan pada satu atau dua pasar saja. Misalnya, karet ke Amerika Serikat, minyak sawit ke MEE, dan udang ke Jepang. Ketergantungan seperti ini tidak sehat bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang. Apabila terjadi perubahan perilaku pasar dinegara-negara yang

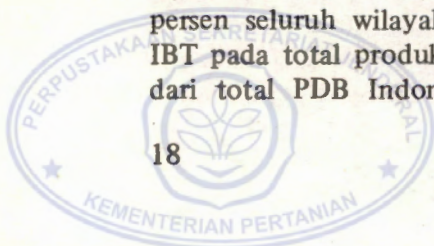


mendominasi pembelian komoditi ekspor kita, baik perubahan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi stabilitas kegiatan ekspor dan kegiatan ekonomi komoditi yang bersangkutan di dalam negeri. Karena itu pengembangan ekspor komoditi pertanian perlu disertai dengan usaha penerobosan pada pasar-pasar non tradisional, seperti pasar pasar di negara berkembang.

Kegiatan reorientasi ekspor tersebut perlu dilandasi oleh kajian keunggulan komparatif komoditi, dan telaahan peluang pasar internasional, sehingga pengembangan komoditi ekspor tersebut dapat berwawasan jangka panjang dan lestari. Disamping itu, pengembangan ekspor komoditi pertanian merupakan kegiatan ekspor dengan keterkaitan ke belakang yang dapat menghela kegiatan pertanian, sehingga aktif dalam peningkatan kegiatan perekonomian di pedesaan, menambah pendapatan petani, memperluas penciptaan kesempatan kerja, dan menaikkan nilai tambah.

#### **d. Dukungan Bagi Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan.**

Tanpa mengecilkkan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya masih perlu mendapat perhatian khusus dalam era agro-industrialisasi nanti. Pemerataan ini mencakup dua hal, yakni pemerataan antar wilayah dan pemerataan pendapatan secara keseluruhan. Dalam hal pertama, harus diakui bahwa pembangunan dari segi perwilayahan selama ini lebih dititikberatkan pada wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB). Oleh karena itu wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) masih cukup jauh ketinggalan dalam banyak hal dibandingkan dengan IBB. Prasarana dasar seperti sarana jalan, fasilitas transportasi, dan fasilitas perhubungan lainnya di IBT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan fasilitas di IBB. Di lain pihak, potensi sumberdaya IBT cukup besar, misalnya wilayah darat IBT merupakan 40 persen dari seluruh wilayah darat Indonesia, sedangkan wilayah laut IBT lebih dari 50 persen seluruh wilayah laut Indonesia, sedangkan sumbangan IBT pada total produk domestik bruto (PDB) hanya 4 persen dari total PDB Indonesia. Pembangunan wilayah IBT perlu

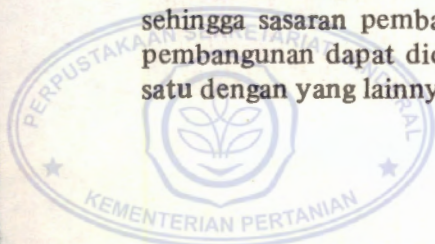


mendapat perhatian, demikian pula halnya dalam hal pembangunan pertanian. Karena potensi perikanan yang sangat besar di wilayah ini, pengembangan komoditas perikanan perlu mendapat perhatian khusus.

Pemerataan pendapatan cenderung membaik selama ini, namun demikian belum seperti yang diharapkan. Pangsa yang diterima mereka yang bergerak di bidang pertanian atau dengan kata lain mereka berada di pedesaan masih belum seimbang dengan mereka yang berada di sektor lain. Keseimbangan pangsa yang diterima oleh setiap sektor perlu mendapat perhatian khusus pula dalam era agro-industrialisasi. Dalam hal ini peranan pemerintah yang cukup besar tetap diperlukan karena mekanisme pasar sendiri tidak akan mampu untuk mengatasi hal tersebut.

#### e. Pembinaan Usaha Tani dan Kelembagaan.

Apabila kita amati secara seksama pada prinsipnya disamping petani dan kelompok tani, pelaku lainnya dalam pembangunan sektor pertanian dapat diklasifikasikan sebagai: (1) Koperasi Unit Desa; (2) BUMN; dan (3) Perusahaan Swasta. Koperasi sebagai soko guru ekonomi diharapkan mampu berperan aktif didalam memperkuat perekonomian pada skala kecil dan usaha keluarga di desa, dengan antara lain secara aktif membantu petani menyalurkan baik input maupun hasil produk serta juga didalam memberikan bimbingan teknis. Sedangkan swasta, sebagai pelaku ekonomi lainnya perlu diberi tempat dan kesempatan pengembangannya di sektor pertanian dalam upaya merangsang dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai dinamisator dan stabilisator pembangunan, pemerintah perlu tetap mempertahankan dan menumbuh-suburkan BUMN sebagai badan usaha yang tidak hanya berfungsi sebagai agent development, penyerapan tenaga kerja, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas utama kita adalah bagaimana menyelaraskan pelaku-pelaku tersebut sehingga sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam Trilogi pembangunan dapat dicapai tanpa ada yang dikorbankan antara satu dengan yang lainnya.



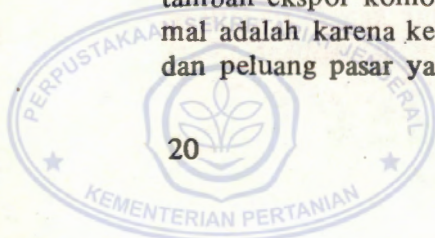
#### **f. Dukungan Dalam Melestarikan Lingkungan.**

Masalah kelestarian lingkungan belakangan ini sudah mulai menjadi masalah sejalan dengan perkembangan sektor industri. Walaupun keluhan terhadap pencemaran lingkungan selama ini terutama ditujukan kepada industri-industri pengolahan, tidak mustahil pada waktu yang akan datang akan terjadi hal yang sama pada sektor pertanian apabila tidak diambil tindakan pencegahan sejak sekarang. Di negara-negara maju umpamanya, penggunaan bahan-bahan kimia dosis tinggi untuk pemupukan secara berkepanjangan tanpa usaha-usaha penangkalan khusus telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan ("over exploitation") perlu diwaspadai. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam perlu disertai dengan usaha-usaha untuk melestarikannya.

### **PERAN DAN PROSPEK AGRIBISNIS DALAM ERA AGRO-INDUSTRIALISASI.**

Setidak-tidaknya ada beberapa alasan keperluan untuk meletakkan harapan kita pada kegiatan agribisnis dalam pembangunan ekonomi nasional guna menyongsong era agro-industrialisasi ini.

Pertama, kita harus senantiasa mencari sumber pertumbuhan kegiatan ekonomi yang mampu memanfaatkan keterkaitan pertumbuhan antara sektor. Seperti yang telah dikemukakan, kegiatan agribisnis dalam perekonomian kita, merupakan perekat bidang singgung antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Pada tingkat perekonomian kita saat ini, pertumbuhan sektor pertanian tidak akan bisa dipercepat tanpa mengindahkan keterkaitan yang erat antara kegiatan produksi, pengolahan manufaktur, dan pemasaran. Salah satu sebab kenapa alokasi penggunaan sumberdaya kita dalam meningkatkan nilai-tambah ekspor komoditi pertanian tradisional masih sub-optimal adalah karena keterbatasan kita dalam meraih kesempatan dan peluang pasar yang ada. Keterbatasan tersebut tidak akan



pernah dapat kita dobrak apabila kegiatan di sektor pertanian hanya berorientasi kepada kegiatan produksi saja.

Kedua, secara nasional kita mempunyai keperluan yang mendesak untuk menyiapkan lapangan kerja baru dalam menghadapi tambahan jumlah angkatan-kerja yang terus meningkat setiap tahun. Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan multi-faset karena keberadaannya pada berbagai tingkat memungkinkannya untuk dikembangkan sampai ke daerah pedesaan. Oleh karena itu, melalui rekayasa pengembangan yang tepat, kegiatan agribisnis berpotensi tinggi untuk menampung dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hubungan ini kita menghadapi paling tidak dua tantangan. Kualitas surplus tenaga kerja yang meninggalkan sektor pertanian karena tertarik kepada aktivitas ekonomi yang memberikan arus pendapatan lebih baik harus dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, kualitas tenaga kerja yang memilih menetap di sektor pertanianpun harus ditingkatkan pula apabila produktivitasnya diharapkan mampu berkompetisi dengan produktivitas tenaga kerja di sektor lain.

Ketiga, secara nasional kita juga mempunyai kepentingan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi perluasan ekspor non-migas yang berakar kepada keunggulan komparatif yang kita miliki. Dalam pada itu, penerobosan terhadap pasar dunia selama ini sangat terbatas karena sebagian besar hasil-hasil pertanian kita masih diekspor dalam bentuk barang-barang mentah ataupun setengah jadi. Sedangkan spektrum potensi permintaan pasar yang dapat kita raih sangat lebar apabila hasil-hasil pertanian tersebut diekspor dalam bentuk hasil-hasil manufaktur. Pemikiran untuk mengembangkan kegiatan agribisnis antara lain didasarkan kepada potensinya dalam meningkatkan nilai tambah produksi hasil-hasil pertanian kita, bukan saja terbatas pada tingkatan petani, tetapi juga sampai ketinggian perdagangan internasional.

Keempat, bagi kami di sektor pertanian adalah juga sangat penting karena pangsa produsen bahan mentah, terutama sekali bagi petani dan pekebun, dalam meraih pendapatan dari proses



nilai tambah perlu diperbesar. Keperluan ini erat kaitannya dengan upaya kita untuk senantiasa memodernisasikan sektor pertanian agar dapat selalu berkompetisi dan mengimbangi perkembangan yang terjadi di sektor lain.

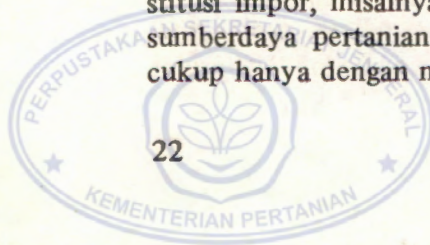
Kelima, kegiatan agribisnis sangat mengandalkan keberadaan sumberdaya alam pertanian yang mempunyai karakteristik dasar sebagai sumberdaya yang senantiasa dapat diperbaharui (*renewable resources*). Karakteristik ini merupakan modalitas yang penting ditonjolkan karena dengan demikian keberlanjutan aktivitas ekonominya senantiasa dapat dipertahankan, tanpa mengurangi keberadaan dan mutu sumberdaya alam pertanian kita.

Kelima alasan yang dikemukakan tersebut memberikan gambaran kepada kita kenapa peran kegiatan agribisnis mempunyai prospek yang sangat penting dalam menyumbangkan andilnya bagi pembangunan ekonomi nasional kita. Akan tetapi masalah yang kiranya paling mendasar yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah kenapa kegiatan agribisnis tersebut belum berkembang sebagaimana mestinya, dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengembangan agribisnis di Indonesia.

## **KENDALA DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS.**

Meskipun cukup banyak kendala yang membatasi perkembangan agribisnis di Indonesia, namun hanya beberapa faktor pembatasan saja yang dibahas di sini dan dianggap paling dominan.

Seperti yang telah dikemukakan, kegiatan agribisnis dalam perekonomian kita merupakan perekat bidang singgung antara sektor pertanian dengan sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu keterkaitan yang erat antar sektor merupakan prasyarat utama bagi berkembangnya kegiatan agribisnis. Pentingnya unsur keterkaitan antar sektor ini sering kali luput dari perhatian kita. Pengembangan industri makanan jadi yang bertujuan untuk substitusi impor, misalnya, sedapat mungkin harus memanfaatkan sumberdaya pertanian kita. Kelayakan arti ekonominya tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepada potensi permintaan



pasar saja. Kegiatan agro-industri yang tidak berakar kepada sumberdaya alam pertanian kita justru akan menjadi bumerang karena pada akhirnya hanya akan menyebabkan meningkatnya ketergantungan kita kepada bahan baku impor. Sebaliknya, alokasi pemanfaatan sumberdaya pertanianpun tidak akan pernah optimal apabila mengabaikan potensi permintaan pasar.

Kegiatan agribisnis sangat memerlukan dukungan teknologi pertanian dan teknologi industri yang lebih maju. Dalam hal ini, bioteknologi dan bioproses merupakan jalur cepat yang dapat kita tempuh guna memacu pertumbuhan sektor pertanian masa depan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi ini harus kita pacu apabila kegiatan agribisnis ingin kita tumbuh-kembangkan. Dalam pada itu, kita berkeyakinan bahwa meskipun dalam bentuk rekayasa teknologi yang masih primitif, sebagian konsepsi dan bentuk bioteknologi dan bioproses tersebut sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat kita di pedesaan. Modalitas inipun harus dapat kita kembangkan karena akan lebih memudahkan apabila hasil rekayasa teknologi itu akan disebarluaskan penggunaannya.

Kegiatan agribisnis, menuntut prasyarat skala ekonomi tertentu. Ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, persyaratan kualitas, serta perlakuan lainnya menyebabkan dimensi skala ekonomi yang dimaksud mungkin berbeda sama sekali dengan konsep skala ekonomi dalam kegiatan produksi pertanian yang selama ini telah kita kenal. Sebagai sumber pemasok bagi kegiatan pengolahan selanjutnya, kegiatan tersebut memerlukan suatu rangkaian pengendalian mutu yang ketat karena dapat mempengaruhi efiseinsi teknis dan ekonomis bagi keseluruhan kegiatan agribisnis.

Kegiatan agribisnis memerlukan bentuk dan unit organisasi ekonomi perusahaan yang spesifik serta kompatibel dengan jenis komoditas yang diusahakan. Salah satu sebab kenapa kegiatan agribisnis di Indonesia belum dapat memberikan performansi yang optimal adalah karena pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada suatu unit organisasi perusahaan yang secara

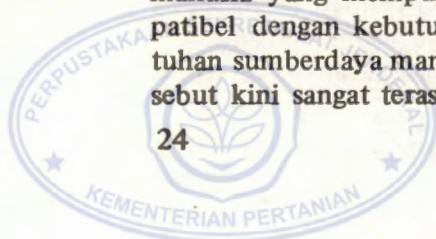


teknis manajerial lebih banyak berorientasi kepada aspek produksi bahan baku saja. Organisasi perusahaan yang diperlukan harus mempunyai kemampuan menopang bukan saja kegiatan produksi dan pengolahan, tetapi juga berkemampuan dalam menunjang upaya penetrasi dalam memanfaatkan peluang pasar. Upaya penetrasi pasar bagi produk-produk industri hilir, misalnya, memerlukan unit organisasi perusahaan yang ditopang dengan keahlian dalam negosiasi dengan mitra dagang ataupun mitra usaha yang umumnya telah memiliki reputasi internasional, dan mempunyai pangsa pasar dunia yang telah mapan.

Iklim usaha mungkin masih belum kondusif bagi menunjang kegiatan agribisnis yang sehat. Kebijakan deregulasi baik dalam bidang moneter, maupun dalam bidang fiskal dan perdagangan yang telah ditempuh oleh pemerintah secara konsekuen dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan langkah-langkah yang sangat penting artinya bagi menciptakan iklim berusaha yang lebih sehat untuk berkembangnya kegiatan agribisnis di Indonesia.

Kendala pasar yang seringkali membatasi upaya kita untuk menerobos pasar internasional adalah eskalasi tarif yang dikenakan oleh banyak negara atas produk olahan yang kita ekspor. Kita mengatasi hal itu, dengan turut berpartisipasi aktif lewat perundingan GATT dalam memperjuangkan turunnya tarif tersebut. Disamping itu, kitapun melakukan perundingan bilateral agar dapat memanfaatkan pasar-pasar yang dapat menyerap produk olahan kita.

Kendala yang dianggap paling penting dan kiranya paling relevan serta menyangkut langsung dengan masalah lembaga pendidikan manajemen adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang kegiatan agribisnis secara profesional. Ketrampilan teknis yang diperlukan dalam menerapkan teknologi pertanian dan teknologi industri yang telah maju masih sangat terbatas. Disamping itu, jumlah sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan manajerial yang kompatibel dengan kebutuhan agribisnis pun masih langka. Kebutuhan sumberdaya manusia dengan kualitas yang diperlukan tersebut kini sangat terasa. Salah satu bukti empiris yang mendu-



kung kenyataan itu adalah dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan yang berupaya memberikan pelayanan bagi penyiapan tenaga-tenaga manajer profesional pada berbagai tingkat keahlian yang dibutuhkan. Kepeloporan Perguruan Tinggi yang bercitra "Center of Excellence" sangat diperlukan agar perimbangan antara pelayanan dengan keperluan tenaga manajer profesional tersebut dapat terjadi sesuai dengan jumlah dan mutu kualitas yang diharapkan.

## PENUTUP

Pembahasan dalam makalah ini dimulai dengan memberikan gambaran mengenai pembangunan pertanian dalam perekonomian nasional kita yang berada dalam phase transisi. Perubahan struktur perekonomian yang telah kita alami sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan menuntut keperluan untuk mendapatkan sumber-sumber pertumbuhan baru di sektor pertanian. Dalam kaitan ini kita berkesimpulan bahwa kini-lah saatnya menggalakkan kegiatan agribisnis di Indonesia.

Telah diuraikan, meskipun secara terbatas, hal-hal yang menyebabkan kenapa kegiatan agribisnis tersebut penting artinya bagi Indonesia, dan mempunyai prospek yang cerah bagi perkembangan perekonomian nasional kita, khususnya bagi pembangunan di sektor pertanian. Makalah ini juga mengupas beberapa faktor dominan yang menjadi kendala dalam perkembangan kegiatan agribisnis di Indonesia.

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam perkembangan agribisnis adalah keterbatasan kita dalam menyediakan kualitas sumberdaya manusia yang diperlukan agar dapat menunjang kegiatan agribisnis tersebut. Dalam hubungan ini kita menggarisbawahi arti penting dan peran lembaga Perguruan Tinggi dalam menyiapkan tenaga-tenaga manajer profesional yang diperlukan.

Jakarta, 1991  
Menteri Muda Pertanian  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah





**PENGANTAR DISKUSI MENGENAI :  
RENCANA PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DALAM  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KEDUA**

**DEPARTEMEN PERTANIAN**

**1992**





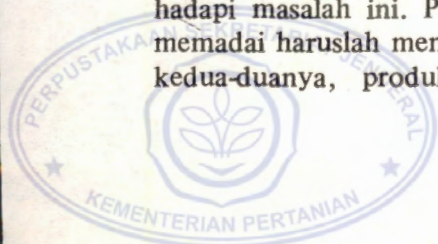
## PENGANTAR DISKUSI MENTERI MUDA PERTANIAN MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP KEDUA

### Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan ekonomi dan sosial masyarakat yang berkelanjutan. Dalam rangka era lepas landas ini, pertanian masih merupakan salah satu sektor tumpuan yang diharapkan dalam proses pertumbuhannya dapat menyerap tenaga kerja yang besar. Sangat disadari kendatipun bahwa telah menurun menjadi sekitar 1.97% per tahun perkembangan penduduk masih akan membawa dampak yang cukup besar terhadap tambahan jumlah angkatan kerja. Dalam Pelita V ini, sektor pertanian diharapkan menyerap tenaga kerja lebih dari 4 juta jiwa. Ini merupakan tantangan yang cukup besar, mengingat luas lahan yang dapat dikembangkan, terutama yang berada di wilayah Indonesia Bagian Barat, kiranya akan semakin terbatas kemampuannya untuk menampung tambahan jumlah angkatan kerja tersebut secara produktif.

Mengambil acuan yang telah ditetapkan dalam GBHN 1988 bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan sektor industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dalam nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja, maka pengembangan sektor pertanian akan memiliki pengaruh yang sangat mendasar, baik dari aspek pembangunan pertanian itu sendiri, dari sektor lain yang terkait dalam pembangunan pertanian seperti sektor industri maupun pada stabilitas pembangunan nasional itu sendiri.

Banyak hal kiranya perlu dikaji lebih lanjut dalam menghadapi masalah ini. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai haruslah menjadi bahan pemikiran awal, karena tanpa kedua-duanya, produk pertanian diperkirakan tidak akan



mampu terus berkembang secara berkelanjutan. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sektor pertanian.

Secara umum, kendala yang masih nampak dalam upaya pengembangan sektor agribisnis ini antara lain adalah skala usahatani yang relatif masih kecil; kualitas dan kuantitas produksi, serta pemodalan yang juga masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam hal pengelolaan sarana, prasarana maupun penanganan pasca panennya. Selain itu, jumlah angkatan kerja yang secara potensial berkualitas untuk mengisi lapangan kerja di bidang pertanian, secara relatif justru cenderung beralih ke sektor lainnya yang diharapkan dapat memberikan penghasilan lebih baik.

Mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor kegiatan utama baik di wilayah Indonesia Bagian Barat maupun di Indonesia Bagian Timur, maka pemerintah sangat menaruh perhatian pada setiap upaya yang dilakukan guna memacu pengembangan agribisnis.

Dalam kaitan ini, pengembangan teknologi sebelum tanam hingga lepas panen (pasca panen) adalah salah satu upaya yang perlu terus ditingkatkan guna menunjang keberhasilan pengembangan agro-industri dan agribisnis di Indonesia.

Arah pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan mengamanatkan bahwa setiap usaha peningkatan produksi sekaligus harus terkait dengan peningkatan pendapatan petani. Peningkatan pendapatan petani dilakukan melalui penanganan dua sisi secara simultan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani (melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi) serta peningkatan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Pendekatan pembangunan seperti ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di lokasi spesifik di pedesaan tersebut sekaligus dapat memacu proses interaksi ekonomi antar desa, antar desa dan kota, antar wilayah dan bahkan antar negara.

Kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan antar wi-



layah dan antar sektor ekonomi merupakan dua isu penting yang harus dipecahkan sekaligus mulai Repelita V ini, menuju terciptanya landasan yang kokoh untuk proses tinggal landas mulai Repelita. Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan pedesaan mendekati yang dicapai oleh sektor ekonomi lainnya maka sektor pertanian dan pedesaan akan tidak dapat turut serta tinggal landas, malah akan dapat menghambat upaya bangsa untuk tinggal landas. Saat ini potensi sektor pertanian yang sangat besar sebagai pasar produk sektor ekonomi lainnya belum dimanfaatkan secara optimal karena tingkat pendapatan pada sektor pertanian ini masih rendah.

Peningkatan pendapatan sektor pertanian merupakan salah satu faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pola konsumsi sektor pertanian dan pedesaan ini mempunyai komponen impor yang sangat rendah, oleh karena itu, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan pedesaan akan meningkatkan permintaan terhadap produk sektor-ekonomi lainnya secara sangat berarti.

Sektor agro-industri yang dikembangkan di sentra produksi pertanian berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja pedesaan dan pemerataan pendapatan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen nilai tambah sektor agro-industri di pedesaan sekitar 60 persen dialokasikan pada upah. Sebaliknya, industri di perkotaan hanya mengalokasikan nilai tambah untuk gaji/upah di bawah 30 persen, karena corak investasinya yang padat modal.

Pertumbuhan agro-industri yang optimal hanya mungkin terwujud manakala perwilayahan pengembangan komoditi didasarkan atas azas keunggulan komparatif regional serta pembangunan industri pengolahannya memenuhi skala ekonomi serta mampu mengendalikan produk yang secara kontinu. Investasi seperti ini harus dapat disertai oleh investasi pemerintah pada sarana dan prasarana ekonomi serta utilitas umum pada sentra produksi pertanian bersangkutan.



Investasi sektor pemerintahan (public) lainnya adalah pada penelitian dan pengembangan komoditi pertanian secara berkesinambungan.

Pengamatan terhadap perkembangan sektor pertanian menunjukkan bahwa selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada bahan mentah dan dikelola dalam bentuk yang lebih merupakan enklave ekonomi. Kita merasa yakin bahwa melalui pengembangan agro-industri dari skala kecil maupun skala menengah di pedesaan, akan tercipta mata rantai pengolahan dalam negeri yang memberikan dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan petani dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha serta menciptakan tambahan lapangan kerja. Kesemua ini akan menimbulkan berbagai dampak positif kepada, antara lain : (1) Percepatan pembangunan perekonomian pedesaan; (2) Penopangan pergeseran tata-nilai masyarakat pedesaan menuju terbentuknya masyarakat industri dalam arti luas; (3) Terbentuknya kemampuan agro-industri dalam negeri yang makin tangguh dan yang dapat memanfaatkan potensi pasar domestik maupun peluang pasar ekspor; (4) Terciptanya momentum dan kemampuan nasional untuk lebih mempercepat proses industrialisasi sebagai akibat semakin meluasnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat pedesaan, dan (5) Meningkatnya ketahanan masyarakat pedesaan secara luas.

### **Ruang Lingkup Pengembangan Agribisnis**

Ruang gerak agribisnis paling tidak meliputi tiga aspek : (1) Aspek pengelolaan usaha pertanian yang meliputi pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. (2) Aspek produk penunjang kegiatan pra dan pasca panen seperti industri penghasil pupuk dan alat mekanisasi pertanian, pestisida, bibit unggul, serta (3) Aspek sarana jasa penunjang seperti perbankan, sarana tataniaga, dan penyuluhan petani khususnya yang menopang kegiatan agribisnis.

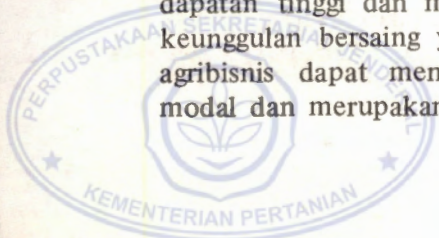
Indonesia adalah negara agraris yang hampir 75% tanahnya



dikelola untuk pertanian. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tinggal di pedesaan (80 persen) dan besarnya tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian (50 persen), maka kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan merupakan kebijaksanaan sentral yang harus tetap dipertahankan. Kebijakan lainnya yang terus diupayakan adalah melakukan deregulasi tataniaga komoditi pertanian/pemasaran hasil-hasil produksi di dalam mata rantai agribisnis sektor pertanian.

Dalam struktur perekonomian Nasional, sektor agribisnis memiliki jangkauan yang sangat luas, yaitu dari skala usahatani yang dikelola keluarga dengan skala usahatani di tingkat nasional. Selain itu, agribisnis juga mencakup keterkaitannya antara sektor pertanian dengan sektor industri hingga seluruh jaringan sistem pertanian dimulai dari pengorganisasian produksi hingga kepada pendistribusian hasil produksi. Oleh karena itu, perlu kiranya dikaji lebih lanjut sektor-sektor pertanian yang terkait dengan sektor industri atau sebaliknya.

Sektor industri pengolahan yang relatif padat modal umumnya sangat erat keterkaitannya dengan sektor pertanian, yang bertindak sebagai pemasok bahan baku. Di lain pihak, hasil-hasil pertanian yang dapat diterima oleh sektor industri pengolahan untuk diolah lebih lanjut, perlu memenuhi beberapa kriteria baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas ini diperlukan untuk menjamin mutu barang olahan yang layak pakai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan industri, sedangkan segi kuantitas dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan produksi. Laju pertumbuhan industri pengolahan yang cukup pesat selama ini, yaitu sekitar 28,38% setahun, tentunya membutuhkan bahan baku dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kondisi yang demikian itulah sektor pertanian diharapkan mampu merangsang pihak swasta untuk menanamkan modalnya sedemikian rupa sehingga membangkitkan arus pendapatan tinggi dan menjangkau segala pelaku serta memiliki keunggulan bersaing yang tinggi pula. Di samping itu, karena agribisnis dapat meningkatkan dan merangsang penanaman modal dan merupakan suatu usaha yang sumberdayanya dapat



senantiasa diperbaruhi (renewable), maka agribisnis merupakan salah satu sektor dengan prospek yang cukup menarik.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, pengembangan teknologi di bidang budidaya pertanian harus terus digalakkan. Di sektor produksi ini tidak hanya dibutuhkan modal saja, tetapi juga sektor penelitian dan pengembangan pertanian. Peran swasta semakin terlihat dalam penanaman modal di bidang pertanian, sementara peran pemerintah semakin berkurang. Namun demikian, dalam bidang penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, peranan pemerintah masih cukup besar, walaupun dari pihak swastapun mulai berminat dalam bidang ini. Pemerintah melalui berbagai lembaga-lembaga penelitian senantiasa berupaya memperkenalkan penemuan-penemuan baru di bidang perekayasaan budidaya pertanian. Peranan swasta dalam penelitian dan pengembangan ini akan cukup besar dan potensi ini perlu dimanfaatkan dan dia-rahkan secara berencana.

#### **Mata Rantai Agribisnis di Indonesia.**

Pola dan hubungan keterkaitan seluruh mata rantai agribisnis di dalam negeri dewasa ini pada umumnya belum optimal dan masih dilandasi oleh ekonomi biaya tinggi. Keadaan ini antara lain disebabkan : (1) pada sebagian besar komoditi pertanian pola produksi belum dalam satu areal yang kompak berkelompok sehingga skala ekonomi daerah belum efisien; (2) sarana dan prasarana ekonomi yang belum memadai untuk daerah produksi tersebut; (3) pola agro industri yang terpusat bukan di sentra produksi di pedesaan tetapi di perkotaan; (4) biaya transportasi yang relatif lebih tinggi; dan (5) sistem kelembagaan yang belum mendukung dengan peranan petani produsen masih lemah, dengan informasi pasar yang belum memadai.

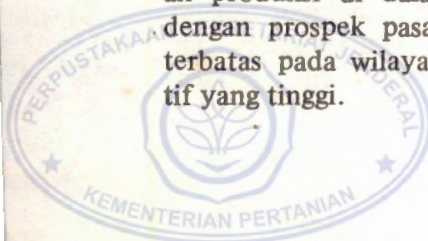
Pola dan sifat keterkaitan seluruh mata rantai agribisnis ini belum berada dalam tingkat yang efisien dan optimal. Untuk menserasikan hubungan ini perlu dikembangkan paket teh-



nologi spesifik untuk setiap wilayah/sentra produksi pertanian, disertai pengembangan wilayah sesuai dengan keunggulan komparatif dan azas skala ekonomi. Kemampuan dan ketrampilan petani untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi perlu pula dikembangkan. Kemudian barulah dikembangkan KUD dari bawah berdasarkan kebutuhan petani.

Pendekatan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan mata rantai agribisnis ini pada waktu mendatang adalah dengan : (1) Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan petani dalam berusahatani secara ekonomis efisien; (2) Menyebarkan informasi pasar dan peluang pasar; (3) Menetapkan standarisasi mutu produksi pertanian secara tegas dan dapat dimengerti oleh birokrasi; (4) Mengembangkan kelembagaan berdasarkan keinginan yang dirasakan oleh birokrasi; dan (5) Konsolidasi kelembagaan pemasaran dan pengembangan market intelijen.

Penggalangan dan pengembangan sistem agribisnis yang efisien dan optimal sudah harus dimulai dalam Repelita V ini, dan ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk dapat membantu proses tinggal landasnya sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh untuk dapat membantu proses tinggal landasnya sektor pertanian dan pedesaan mulai Repelita VI nanti. Dalam menghadapi pasar luar negeri sebetulnya kita sudah memiliki KADIN bersama berbagai bentuk asosiasi komoditi yang seharusnya dapat berfungsi dengan baik. Masalah utama yang kita hadapi adalah kemampuan atau daya saing komoditi harus ditingkatkan baik dalam hal harga, kualitas maupun ketepatan waktu dalam penyerahan barang. Masalah lainnya yang penting juga adalah kemampuan kita dalam "market intellijen" yang mencakup potensi dan prospek pasar dan prospek harga komoditi dan barang substitusinya. Di samping upaya tersebut di atas perlu pula lebih ditingkatkan kegiatan promosi komoditi pertanian kita di berbagai pasar di luar negeri. Kegiatan produksi di dalam negeri hendaknya kita kaitkan sesuai dengan prospek pasar luar negeri tersebut dan dikembangkan terbatas pada wilayah yang mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi.



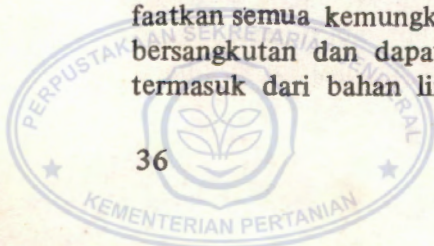
Sektor industri pengolahan yang relatif padat modal pada umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku. Untuk dapat mendukung jenis industri ini, komoditi pertanian yang dihasilkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain dari segi kuantitas misalnya, harus tersedia secara kontinyu dari segi kualitas harus konsisten sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan industri.

Industri pertanian umumnya merupakan industri yang padat karya, baik pengolahan hasil-hasil pertanian, maupun budidaya usaha pertanian. Dapat disimpulkan bahwa agro-industri yang berskala kecil lebih berperan dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan agro-industri berskala sedang dan besar, walaupun di pihak lain memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap nilai tambah.

Saya masih berpendapat bahwa keterkaitan antar sektor masih lemah. Oleh karena itu tekad untuk menempatkan pengembangan agro-industri dan agribisnis pada posisi sentral dalam pembangunan pertanian dan pedesaan menuntut kita untuk lebih mensesuaikan wilayah komoditi pertanian dengan zona industri. Pada saat ini pendekatan yang telah dilakukan Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian dalam pola pembinaan agro-industri dan agribisnis di pedesaan, sebagai berikut :

#### (a) Pendekatan PIR (Perusahaan Inti Rakyat)

Pola ini telah berhasil dikembangkan oleh Departemen Pertanian dan secara relatif merupakan pola yang paling paripurna untuk mengembangkan agro-industri. Skala usaha dan hubungan antara petani plasma dengan perusahaan inti telah diatur secara jelas dalam pengembangan komoditi terpilih. Langkah yang masih diperlukan adalah memperluas cakupan agro-industri dengan integrasi vertikal yang mencakup industri hilir dengan diversifikasinya. Kegiatan ini diharapkan dapat memanfaatkan semua kemungkinan yang ada pada usaha industri yang bersangkutan dan dapat mengembangkan industri sampingan, termasuk dari bahan limbahnya. Rangsangan untuk berinvest-



tasi, baik oleh perusahaan Inti yang telah ada, maupun oleh perusahaan baru, perlu terus digalakkan. Sangat diharapkan bahwa perkoperasian akan dapat mengantarkan petani plasma menjadi pemegang saham baik dari agro-industri hilir maupun perusahaan pengolah limbah yang didirikan. Keterkaitan kelembagaan dan pembagian risiko yang seimbang antar berbagai kelembagaan yang terkait dalam PIR ini perlu lebih disempurnakan.

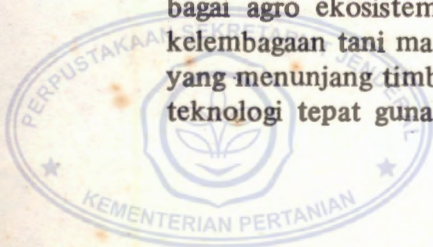
#### **(b). Pendekatan Bapak Angkat**

Pola yang relatif paling siap untuk dikembangkan ini dirintis oleh Departemen Perindustrian. Pola ini perlu diperluas melalui pengikutsertaan Badan Usaha Milik Negara di bawah binaan Departemen Pertanian dengan menyusun program terpadu mencakup wilayah serta komoditi terpilih. Beberapa hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut dalam mengoperasionalkan pendekatan ini adalah : (1) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana BUMN yang disediakan untuk program ini; (2) Rincian peran perusahaan Bapak Angkat baik terhadap perusahaan anak angkat, koperasi maupun perusahaan swasta; (3) Tolok ukur untuk memilih Anak Angkat; (4) Tolok ukur untuk menilai keberhasilan program.

#### **(c) Pendekatan Kelembagaan Pedesaan**

Pola ini merupakan yang paling kompleks karena mencakup penggeseran seluruh tata nilai masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, oleh karenanya, juga merupakan pola yang mempunyai dampak paling nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan.

Pendekatan ini memerlukan langkah pematapan lebih lanjut dengan melakukan, antara lain : (1) Kajian mendalam mengenai ekonomi pedesaan khususnya yang menyangkut kendala yang membatasi perkembangan industri pedesaan di berbagai agro ekosistem; (2) Rekayasa pertanian baik mengenai kelembagaan tani maupun pola pertanaman dan pola pertanian yang menunjang timbulnya industri pengolahan; (3) Penyediaan teknologi tepat guna untuk setiap tahap produksi; dan (4) Ke-



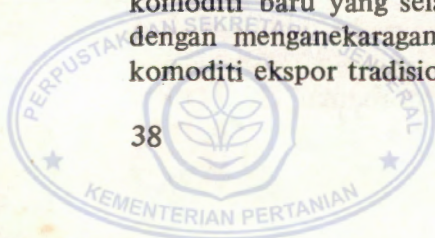
hadiran lembaga koperasi maupun swasta yang mau serta mampu bertindak sebagai perusahaan pembina.

Kita sudah bertekad menjadikan pembangunan pedesaan sebagai pusat perhatian pembangunan nasional, oleh karena itu dukungan Pemerintah Daerah terhadap program pengembangan agro-industri ini mutlak diperlukan.

Perkembangan ekspor komoditi pertanian Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi persaingan negara pemasok lainnya. Karena itu, dukungan sektor pertanian terhadap kegiatan ekspor tidak cukup dipandang dari sisi peningkatan produksi domestik saja, tetapi juga sisi perkembangan pasar internasional perlu senantiasa turut diperhatikan. Dengan demikian, pengembangan ekspor komoditi pertanian harus dilihat tidak hanya dalam peningkatan volume dan nilainya saja, reorientasi dalam pengembangan ekspor komoditi pertanian perlu dilakukan, yaitu antara lain mencakup :

**Pertama**, ekspor komoditi pertanian harus dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut di pedesaan. Selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada ekspor bahan mentah. Dengan mengembangkan teknologi pengolahan, baik yang berskala besar maupun yang menggunakan teknologi pengolahan yang tepat guna bagi industri kecil di pedesaan, maka akan tercipta mata rantai industri pengolahan di dalam negeri yang dapat memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan nilai tambah, pendapatan petani, nelayan dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

**Kedua**, peningkatan ekspor komoditi pertanian perlu juga dicapai melalui diversifikasi komoditi ekspor. Saat ini ekspor komoditi pertanian tertumpu pada beberapa komoditi tertentu saja. Dengan diversifikasi komoditi, maka mata dagangan ekspor komoditi pertanian diperluas, baik dengan munculnya komoditi baru yang selama ini belum dikembangkan maupun dengan menganekaragamkan jenis produk-produk ekspor dari komoditi ekspor tradisional yang biasanya diekspor dalam satu



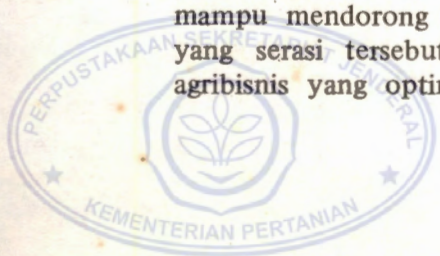
bentuk mata dagangan saja, yaitu bahan mentah.

Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa dalam usaha menggaling kekuatan agribisnis agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi di pasar internasional, sebaiknya dengan memanfaatkan wadah-wadah yang telah ada yang ditunjang oleh suatu sistem keterkaitan kerja yang saling mendukung antar berbagai sektor.

### **Strategi Pengembangan Agribisnis**

Implikasi yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan agribisnis adalah upaya-upaya untuk memelihara keluwesan alokasi dan penekanan investasi yang harus senantiasa didasarkan pada komposisi serta kualitas sumberdaya alam yang berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah yang lain, dan dari suatu waktu ke waktu yang lain. Dengan demikian untuk menjamin suatu pertumbuhan perekonomian nasional yang serasi, harmonis, dan seimbang, maka diperlukan suatu perangkat kebijaksanaan perekonomian makro yang sangat memperhatikan karakteristik sektor pertanian guna dapat lebih menjamin agar sektor pertanian akan tetap dapat berperan-serta secara optimal dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan sejalan dengan karakteristik struktur perekonomian kita di masa depan, maka sementara keterlibatan pemerintah semakin berkurang, pada saat yang sama investasi pihak swasta diharapkan dapat mengisi peran pemerintah tersebut. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mampu menciptakan mitra kerja yang serasi antara swasta dan petani. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain : (a) Aturan main yang disepakati oleh kedua aktor ekonomi ini harus transparan; (b) Adanya kejelasan serta kepastian mengenai pembagian hasil maupun dalam menanggung resiko; dan (c) Kerjasama tersebut harus mampu mendorong kemandirian petani. Hubungan dua arah yang serasi tersebut akan lebih mendorong perkembangan agribisnis yang optimal, apabila juga dilandaskan pada pola



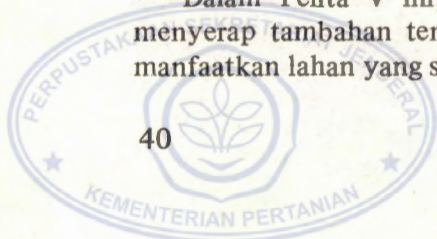
pemikiran yang senantiasa mengacu kepada keunggulan komparatif yang berakar kuat kepada kekuatan komposisi serta kualitas sumberdaya kita sendiri, sehingga keberlanjutannya dapat terus terjamin.

Seljalan dengan itu, strategi pengembangan agro-industri yang berlandaskan pada pola pemikiran tersebut di atas diharapkan dapat menumbuhkan industri pedesaan yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berimbang, meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dengan mempersatukan tujuan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta pilihan lokasi industri yang efisien dan sesuai dengan tipe maupun ukuran industri yang dimaksud. Dengan demikian, untuk selanjutnya diharapkan akan muncul suatu pola dan struktur produk pertanian yang berdiversifikasi. Sumbangan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja agro-industri tersebut dapat langsung dinikmati masyarakat pedesaan. Selain itu, sifat-sifat industri demikian pada dasarnya mempunyai dampak pengganda ("multiplier effect") yang sangat besar, yang terutama akan ditangkap dan dinikmati masyarakat maupun wilayah yang bersangkutan. Oleh karenanya, agar agro-industri tersebut dapat berkembang secara efisien di daerah pedesaan, diperlukan reorientasi program pengembangan komoditi ke arah pengembangan sentra (seluruh) komoditas pertanian dengan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.

### Penutup

Mengingat pentingnya pengembangan agribisnis ini, pemerintah bertekad menempatkan pengembangan sektor agribisnis pada posisi sentral di dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Tekad tersebut telah tertuang dalam GBHN'88 yang pada dasarnya masih bertumpu pada pertanian tangguh yang didukung sektor industri yang kuat.

Dalam Pelita V ini, sektor pertanian diharapkan mampu menyerap tambahan tenaga kerja yang cukup besar dalam memanfaatkan lahan yang semakin terbatas kemampuannya.



Kendala yang masih nampak dalam upaya pengembangan sektor agribisnis antara lain skala usahatani yang relatif masih kecil; kualitas dan kuantitas serta permodalan yang masih sangat terbatas perlu sedini mungkin dilonggarkan, sehingga pengembangan sektor ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Upaya-upaya untuk memelihara keluwesan alokasi investasi harus senantiasa didasarkan pada komposisi serta kualitas sumberdaya alam perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan agribisnis.

Untuk mencapai tujuan tersebut, investasi dari pihak swasta diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan cara menciptakan iklim yang lebih kondusif. Pemerintah bertekad untuk terus melanjutkan deregulasi, sembari menjamin bahwa porsi petani kecil tidak digarap oleh pengusaha besar.

Khusus dalam pengembangan agribisnis, kita perlu menyusun langkah bersama agar investasi dan alokasi dana pemerintah di pertanian dan pedesaan mampu merangsang pertumbuhan agribisnis yang kaya akan keterkaitan. Dalam upaya pemerintah memperbaiki iklim usaha sangat diharapkan masukan-masukan dari dunia swasta mengenai kendala yang masih menghadang peningkatan kesejahteraan petani kecil melalui pengembangan agribisnis akan mendorong pertumbuhan dunia swasta.

Jakarta, 29 Januari 1991  
Menteri Muda Pertanian

ttd.

Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah





**PENGARAHAN MENTERI MUDA PERTANIAN  
DALAM  
RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN PERTANIAN  
TANGGAL, 3 – 7 FEBRUARI 1992**



**DEPARTEMEN PERTANIAN**

**1992**





**MENTERI MUDA PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGARAHAN MENTERI MUDA PERTANIAN  
DALAM RAPAT KERJA NASIONAL  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
Jakarta, 3 Pebruari 1992**

**Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, Saudara-saudara peserta Rapat Kerja Nasional yang saya hormati,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Sungguh merupakan suatu hal yang sangat baik bahwa Rapat Kerja Nasional dapat kita selenggarakan tepat pada momentum menjelang tahun keempat Pelita V. Dengan demikian forum ini kita harapkan dapat merupakan ajang bagi kita untuk melakukan evaluasi atas semua program pembangunan pertanian sejak awal Pelita V dan bila dirasa perlu, melakukan berbagai penyesuaian untuk diterapkan pada dua tahun mendatang, guna dapat lebih menjamin keberhasilan kita memantapkan kerangka landasan memasuki era lepas landas. Oleh karena itu, sewajarnya kita syukuri ridho Allah swt. atas terselenggaranya Rakernas ini, dan mohon rakhmatNya agar forum ini benar-benar mampu menghasilkan rumusan yang dapat dipergunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pertanian.

**Bapak Menteri Pertanian yang saya hormati, Saudara-saudara peserta Rakernas yang saya hormati,**

**Beberapa saat lagi kita akan memasuki era Pembangunan**

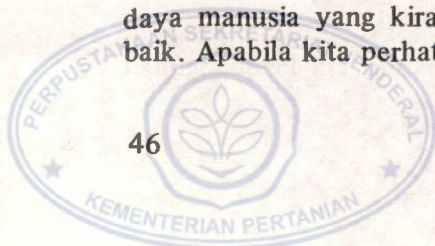


Jangka Panjang tahap II. Diperkirakan pada saat memasuki era tersebut sasaran utama untuk mewujudkan keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri yang dicanangkan pada Pelita V saat ini sudah akan tercapai. Kondisi angkatan kerja nasional yang bergerak pada sektor pertanian, serta besarnya permintaan potensial bagi produk-produk pertanian dan industri, tentu akan menjadikan semakin strategisnya peran sektor pertanian dalam memasuki era lepas landas dimaksud.

Harapan yang tertumpu pada sektor pertanian selain agar mampu tumbuh berkembang dengan laju yang tinggi, juga diarahkan untuk dapat sekaligus memecahkan masalah-masalah ekonomi nasional berupa penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat tani dan sekaligus menanggulangi kemiskinan. Sampai saat ini, peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian negara masih sangat menonjol, baik dipandang dari sisi produk, pasar faktor produksi, maupun penghasilan devisa. Walaupun pangsa sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun, sehingga pada tahun 1989 menjadi hanya 19.57 persen, akan tetapi nilai absolutnya justru menunjukkan peningkatan.

Selama 25 tahun terakhir jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat terus, walaupun secara relatif menurun. Pada tahun 1971 jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebanyak 26,5 juta (64,2 persen dari total angkatan kerja). Pada tahun 1980, jumlah tersebut naik menjadi 28,0 juta (54,7 persen) dan pada tahun 1989 meningkat lagi menjadi 41,1 juta orang (55,6 persen).

Apabila penyebaran penduduk yang bekerja di sektor pertanian kita lihat secara spesial dan berdasarkan kualitas sumberdaya manusianya, maka upaya penyebaran pembangunan pertanian ke seluruh pelosok tanah air menghadapi kendala sumberdaya manusia yang kiranya perlu kita pertimbangkan dengan baik. Apabila kita perhatikan secara regional, maka 82,2 persen



pekerja di sektor pertanian tersebar dalam wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB). Selebihnya yaitu 17,8 persen tersebar di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT). Lebih dari separuh jumlah yang bekerja di wilayah IBB tersebut berusaha di Pulau Jawa. Sebagai gambaran kasar, dari 70,2 juta hektar penggunaan sumberdaya lahan pada tahun 1989., hanya 13,57 persen yang dapat disediakan di pulau Jawa. Keadaan ini tentu menggambarkan kapasitas dukung sumberdaya alam yang tidak seimbang dengan distribusi tenaga kerja.

Apabila kualitas sumberdaya manusianya yang kita perhatikan, maka kita patut bergembira karena telah terjadi suatu perbaikan yang cukup berarti. Kalau pada tahun 1983, sektor pertanian didukung oleh lebih dari 18,54 persen tenaga kerja yang berpendidikan Tamat Sekolah Dasar, maka pada tahun 1989 persentase itu telah berlipat ganda menjadi 36,78 persen. Akan tetapi, perlu kita simak dengan baik mutu kualitas sumberdaya manusia yang masih kurang seimbang antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya.

Secara keseluruhan perubahan pangsa relatif tersebut memang sesuai dengan makin berkembangnya sektor-sektor di luar pertanian, akan tetapi terlihat jelas bahwa persoalan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian merupakan masalah yang teramat penting untuk dipecahkan dalam mewujudkan perekonomian nasional yang adil dan kokoh menghadapi segala tantangan.

Lebih jauh lagi, sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kita ketahui bersama bahwa bagi penduduk pedesaan, sektor pertanian masih merupakan sumber mata pencaharian utama. Hasil perhitungan Biro Pusat Statistik memperlihatkan bahwa baik secara relatif maupun absolut penduduk miskin di pedesaan menurun dari 17,42 persen pada tahun 1987 menjadi 15,08 persen pada tahun 1990, atau secara absolut menurun dari 20,3 juta orang menjadi tinggal 17,8 juta orang. Tentu saja keberhasilan ini merupakan hasil karya semua pihak dan terwujud



berkat kerja sama antar sektor dan partisipasi seluruh masyarakat.

Berbagai kontribusi sektor pertanian tersebut secara bersama-sama diharapkan pada masa-masa mendatang akan terus memacu pertumbuhan sektor-sektor perekonomian, baik sektor industri maupun jasa, sehingga dapat membantu proses transformasi struktur pekonomian yang dikehendaki, membawa perkembangan yang positif pada masyarakat tani dengan semakin terbukanya ekonomi pedesaan. Dengan demikian diharapkan pembangunan sektor pertanian mampu berperan sebagai motor penggerak untuk mendorong terciptanya perubahan struktur ekonomi pedesaan ke arah yang lebih berimbang. Perubahan seperti ini diharapkan dapat lebih membuka peluang-peluang bagi masyarakat tani di pedesaan untuk dapat meningkatkan pendapatannya melalui sumber mata pencaharian yang semakin beragam dan berdiversifikasi.

Sasaran untuk mewujudkan sektor pertanian yang tangguh dalam era industrialisasi modern di atas tidak akan dapat tercapai, jika masyarakat tani di pedesaan tidak berperan secara aktif di dalamnya. Masyarakat tani dalam kriteria ini adalah petani pangan, petani perkebunan, peternak dan nelayan. Merekalah yang pada akhirnya menentukan arah pengembangan usahanya, melalui serangkaian keputusan mengenai penggunaan dan alokasi sumberdaya, keputusan mengenai apa dan seberapa besar produksi pertanian yang ingin dicapai, keputusan mengenai volume dan kapan hasil produksinya dipasarkan, dan keputusan-keputusan kegiatan usahatani lainnya. Dengan demikian, keberadaan masyarakat tani merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan pertanian.

Berlandaskan pada orientasi pembangunan di atas, maka keberhasilan pembangunan pertanian dalam masa mendatang akan sangat tergantung pada pengembangan sumberdaya manusia, yang sekaligus merupakan potensi pasar di dalam negeri. Realisasi dari potensi yang besar ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas kerja dan



pendapatan petani dengan cepat, sehingga akan mewujudkan pemerataan dan ekonomi yang berimbang. Pengembangan sumberdaya manusia sebagai sentra pembangunan tentu akan turut dipengaruhi pula oleh peningkatan nilai gizinya, yang akan lebih memungkinkannya mengembangkan aspirasinya dalam pembangunan nasional.

**Bapak Menteri Pertanian yang saya hormati, Saudara-saudara peserta Rakernas yang saya hormati,**

Salah satu faktor utama yang menjadi prasyalam perekonomian nasional, karena ia akan terus dan pedesaan tersebut adalah semakin kuatnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya dalam sebuah sistem perekonomian nasional, yang berbasiskan pada agro-industri dan agribisnis. Kuatnya keterkaitan antara pembangunan sektor pertanian dan pedesaan di satu pihak akan lebih mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian itu sendiri, dan di pihak yang lain akan lebih mampu membuka struktur ekonomi pedesaan, dalam arti mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu, saya minta agar seluruh jajaran Departemen Pertanian secara sungguh-sungguh menyebarkan persepsi pertanian yang tidak terbatas pada usaha bercocok tanam semata. Seluruh masyarakat perlu kita yakinkan bahwa sasaran lepas landas bangsa baru akan tercapai manakala semua kita sudah meninggalkan egoisme sektoral dan tidak lagi memiliki wawasan yang terkotak-kotak.

**Saudara-saudara sekalian,**

Iklim usaha untuk menunjang pengembangan perekonomian pedesaan yang berbasiskan agro - industri dapat diawali melalui usahatani sehamparan secara kooperatif, dengan diikuti oleh upaya transformasi struktur ekonomi pedesaan melalui pengembangan industri pedesaan berbasis pertanian skala kecil dan menengah, serta dikelola oleh masyarakat pedesaan itu sendiri. Dalam kaitan ini, reorientasi pembangunan diprioritaskan pada investasi untuk mendorong diversifikasi pertanian

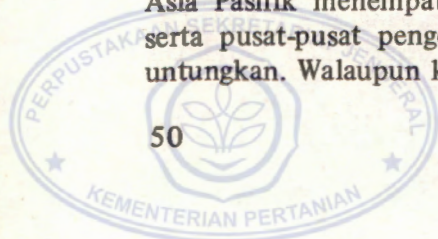


dengan pengembangan agribisnis disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Keutuhan dan keterpaduan dalam pengembangan agribisnis akan menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang tetap penting di dalam perekonomian nasional, karena ia akan terus mampu menjadi pendorong serta penarik pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, pada gilirannya potensi pasar dalam negeri akan dapat ditumbuhkembangkan dengan pesat pula, sehingga terintegrasinya komoditas dan pasar domestik dalam kesatuan wilayah nusantara akan menjamin terwujudnya kesatuan ekonomi nasional yang utuh. Oleh karenanya, diversifikasi pertanian yang merupakan proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian adalah merupakan kerangka untuk mewujudkan kesatuan ekonomi nasional, yang sekaligus pula berperan memantapkan persiapan sektor pertanian dalam memasuki era tinggal landas.

Era globalisasi yang mengakibatkan semakin kompetitifnya pasar internasional disertai dengan semakin terbukanya ekonomi domestik di tengah-tengah kecenderungan terus menurunnya harga berbagai komoditas pertanian jelas menghendaki upaya peningkatan efisiensi agribisnis dan kebijaksanaan ekonomi-politik yang semakin transparan. Dalam pada itu, kesadaran masyarakat di negara-negara maju terhadap kesehatan dan lingkungan, memaksa kita untuk memperhatikan aspek pencemaran dan kebersihan lingkungan dalam memasarkan hasil-hasil pertanian kita ke negara-negara maju tersebut. Untuk menghadapi kecenderungan tersebut, peningkatan daya saing komoditas pertanian dengan paket teknologi maju dan peningkatan kualitas komoditas pertanian yang dihasilkan harus diterapkan secara berkelanjutan.

Dalam pada itu, proses globalisasi ekonomi dan meningkatnya kegiatan ekonomi dan saling ketergantungan di kawasan Asia Pasifik menempatkan Indonesia Bagian Timur (IBT) beserta pusat-pusat pengembangannya dalam posisi yang menguntungkan. Walaupun keunggulan komparatif ini masih bersifat



potensial, namun secara geografis wilayah IBT di masa mendatang akan dapat berperan pula sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang baru.

**Bapak Menteri Pertanian yang saya hormati, Saudara-saudara peserta Rakernas yang saya hormati,**

Kini saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk melihat sejenak kemajuan dalam perkembangan agro-industri yang telah kita galakkan selama tiga tahun terakhir ini.

Jika kita simak perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun ini, maka perkembangan agro-industri selama ini cukup menggembirakan. Walaupun dengan ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda, namun boleh dikatakan di semua sub sektor dalam bidang pertanian kita mengamati terjadinya perkembangan beberapa kegiatan ekonomi yang berwawasan pola pikir agro-industrialisasi. Keperluan untuk memperhatikan keterkaitan antara fungsi produksi, pengumpulan, pengolahan, dan distribusi hasil-hasil produksi pertanian kini semakin dirasakan.

Beberapa contoh dapat kita kemukakan di sini. Berbagai pola kerja sama antara petani dan pengusaha pengolah mulai diterapkan, misalnya dalam sub sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Peran serta pabrik pengolah sebagai mitra kerja petani yang semula diprakarsai BUMN, kini telah berkembang mencakup perusahaan swasta. Kecenderungan ini mulai tampak, tidak hanya terbatas di pulau Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa. Kegiatan agro-industri yang berkembang juga mencakup pengembangan industri kecil serta jasa perbengkelan alat-alat mesin pertanian. Dalam pada itu, melalui beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dirancang untuk melindungi kepentingan pengusaha ekonomi lemah dan kecil, maka efektifitas BUMN sebagai mitra kerja petani dalam pengembangan usaha agro-industri pada masa yang akan datang diharapkan akan semakin meningkat lagi.

Meskipun dengan alokasi dana yang terbatas, program pembangunan pertanian yang dirancang dalam beberapa tahun anggaran terakhir ini juga memperhatikan pola pikir pengem-

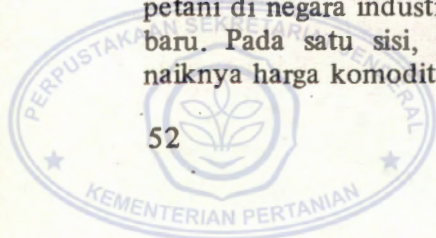


bangun agro-industri sebagai titik tolaknya. Beberapa di antara program tersebut bahkan secara khusus diarahkan kepada sasaran kelompok masyarakat yang selama ini belum dapat terjangkau oleh program-program yang telah ada seperti program kegiatan Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus. Dengan akses yang semakin meningkat diharapkan masyarakat yang terpencil tersebut dapat memperbaiki taraf hidup mereka sehingga mengurangi jumlah masyarakat kita yang miskin.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Departemen Pertanian telah mulai mencanangkan secara selektif pengembangan dalam penggunaan alat-alat mesin pertanian baik dalam proses produksi maupun dalam kegiatan pasca panen. Di beberapa daerah terutama di luar pulau Jawa, perkembangan pelayanan jasa pengolahan yang menggunakan alat-alat mesin pertanian telah berkembang dengan pesat. Secara terbatas, di pulau Jawa pun hal itu terjadi antara lain karena keperluan untuk memanfaatkan tenaga mekanisasi pertanian tambahan sebagai akibat jadwal masa tanam yang ketat seiring dengan keperluan tenaga kerja yang tidak tersedia pada waktu yang bersamaan. Prospek penyediaan jasa pengolahan ini cukup cerah, mengingat mulai tertariknya beberapa pengusaha swasta untuk turut bekerja dalam cabang kegiatan ekonomi tersebut.

Namun demikian kita menyadari bahwa masih banyak peluang kegiatan bisnis industri pertanian di pedesaan yang dapat dilakukan. Agar dapat diperoleh keterkaitan optimal industri pertanian dan pedesaan, maka ciri industri pertanian yang ingin didorong adalah tumbuh dan berkembangnya spesialisasi usaha industri pengolahan pada setiap mata rantai agribisnis dan diversifikasi pengolahan yang menimbulkan peningkatan nilai tambah industri yang kaya dengan keterkaitan serta perluasan bidang usaha dan lapangan kerja.

Keberhasilan perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay mengurangi tingkat bantuan dan perlindungan pada petani di negara industri kelak akan membuka peluang-peluang baru. Pada satu sisi, pengurangan bantuan akan mendorong naiknya harga komoditi sehingga meningkatkan daya saing kita.



Sedangkan pengurangan perlindungan pada sisi yang lain akan membuka pasar-pasar baru bagi komoditi dan produk pertanian kita.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Walaupun kita melihat telah terjadi kemajuan yang cukup nyata dalam perkembangan agro-industri, namun beberapa masalah dan persoalan kritis dalam upaya mencapai tujuan pengembangan agro-industri tersebut masih banyak kita jumpai. Sebagian masalah tersebut merupakan tantangan persoalan yang harus dapat kita pecahkan bersama. Meskipun masalah yang mungkin Saudara hadapi dalam pekerjaan Saudara-saudara lebih banyak lagi, namun saya catat beberapa masalah yang kiranya perlu kita perhatikan.

### 1. Risiko Berusaha yang Tinggi

Di dalam hal perkembangan investasi di pedesaan, telah umum diketahui bahwa penanaman modal di bidang industri pertanian (agro-industri) di pedesaan menghadapi risiko yang dirasakan lebih besar ketimbang risiko penanaman modal di bidang industri perkotaan atau jasa. Risiko tidak hanya timbul karena akses pasar yang sempit dan gejolak harga yang relatif tinggi, akan tetapi juga dari proses produksi yang masih sangat tergantung pada musim. Seiring dengan itu fasilitas penyediaan sarana produksi, terutama permodalan kurang pula menunjang aspek risiko tinggi tersebut, sehingga terkesan lembaga keuangan seperti perbankan terasa tidak memihak kepada kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam hal ini diperlukan iklim ekonomi yang dapat menjamin kepastian berusaha. Pengembangan pola kerja sama antara petani dan pabrik pengolahan misalnya, tidak hanya terbatas kepada pembagian keuntungan yang setara, tetapi juga pembagian yang adil dalam menanggung risiko berusaha. Oleh karena kian meningkatnya risiko tadi, maka kerja sama yang selama ini dijalin atas kepercayaan semata, kini perlu ditempatkan atas landasan hukum yang lebih kokoh lagi.



## 2. Faktor Penyebab Kerapuhan Agro - Industri di Pedesaan.

Gambaran sementara ini menunjukkan bukti-bukti bahwa agro-industri yang tumbuh di pedesaan, terutama industri pangan, mempunyai peranan yang penting dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga penduduk pedesaan. Namun beberapa di antara kegiatan agro-industri tersebut sangat rapuh. Faktor penyebab kerapuhan itu antara lain adalah karena jangkauan pemasaran hasil olahannya belum terlalu luas, beragamnya kualitas bahan baku yang dihasilkan, belum terjaminnya kontinuitas hasil produksi, serta kemampuan modal investasi yang masih sangat terbatas.

## 3. Kesenjangan dalam pertumbuhan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam berbagai hal kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan belum sepenuhnya mengarah kepada sasaran yang dikehendaki. Dalam beberapa hal, seringkali para petani di pedesaan, terutama petani kecil, buruh tani dan nelayan, tidak mampu menangkap aba-aba pasar karena tidak mempunyai akses untuk itu (teknologi, keterampilan, dan modal). Akibatnya tidak semua kelompok dalam masyarakat dapat meraih peluang ekonomi yang tersedia. Apabila proses ini dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya koreksi, maka dikhawatirkan bahwa program yang kita kembangkan justru akan dapat memperbesar peluang timbulnya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial dalam masyarakat. Saya menggarisbawahi hal ini karena untuk menjamin terlaksananya Trilogi Pembangunan pada tahap pembangunan sekarang ini, masalah kegagalan pasar jelas memerlukan perhatian khusus kita bersama untuk dapat diantisipasi dan dikoreksi sedini mungkin.

## 4. Pendekatan yang masih belum Terpadu

Aspek lain yang tampaknya ikut memperlambat laju pertumbuhan investasi di sektor industri pertanian di pedesaan adalah kurang diperhatikannya keharusan untuk sejak awal menerapkan pendekatan terpadu yang utuh. Umumnya produk



pertanian cepat membusuk dan bervolume besar dibanding dengan nilainya. Penanganan pasca panen, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan lancarnya pemasaran menjadi sangat penting. Apabila penanam modal tidak mampu menerapkan prinsip integrasi vertikal dalam investasinya ia harus tergantung kepada adanya investasi lain yang menjamin hadirnya semua mata rantai yang diperlukan agar produknya dapat dipasarkan dengan baik. Sekali lagi di sini saya mengharapkan agar lembaga-lembaga koordinasi yang sudah ada antara sub-sektor dan lintas departemen teknis perlu terus ditingkatkan efektifitasnya.

#### **5. Skala Usaha yang tidak Kompatibel**

Sebagaimana yang telah sering saya kemukakan, kegiatan agro-industri dan agribisnis menuntut bentuk skala usaha dan unit organisasi yang spesifik serta kompatibel dengan jenis komoditas yang diusahakan. Kegiatan agro-industri tidak cukup dilakukan oleh unit kelembagaan yang hanya berorientasi pada sektor produksi saja, akan tetapi menyangkut persoalan-persoalan pengolahan, pasar dan produk-produk hilirnya. Oleh karenanya, kendala-kendala teknis maupun yang bersifat non-teknis mutlak memerlukan penanganan.

#### **6. Rekayasa Kelembagaan Sosial Ekonomi di Pedesaan.**

Upaya-upaya kelembagaan harus menempatkan koperasi sebagai ujung tombak dalam memperbaiki posisi tawar para petani sebagai anggota koperasi. Dalam kaitan ini, keberadaan dan peran koperasi unit desa secara bertahap perlu didorong ke arah: (a) pengolahan melalui pola kerja sama tertentu seperti hubungan inti-plasma; (b) Spesialisasi produksi berdasarkan keuntungan koperatif yang bersifat kompetitif baik dilihat dari sisi masyarakat petani maupun wilayah (c) Perjuangan memperkuat posisi tawar untuk memperoleh iklim harga yang merangsang dengan stabilitas yang mantap baik di tingkat petani maupun konsumen.

Salah satu rekayasa kelembagaan yang sudah sangat dikenal



di sektor pertanian antara lain berupa pengejawantahan dari kelompok petani sehamparan kepada masalah-masalah yang tidak hanya sekedar berada dalam lingkup produksi saja, akan tetapi lebih daripada itu mengkait kepada lingkup pengolahan hasil produksi lanjutan. Selain itu, upaya meraih keuntungan bersama antara industri "besar" dengan petani "kecil" perlu didorong ke suatu arah di mana di satu sisi kendala-kendala petani (akses terhadap teknologi dan modal) mampu dilonggarkan akan tetapi di sisi lain dampak positif skala komersial tetap mampu untuk ditangkal secara optimal.

Dalam kaitan ini, semangat kooperatif yang tumbuh dari bawah harus dapat disalurkan melalui lembaga formal yang sehat. Sekali lagi koordinasi antara instansi yang terkait memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita luhur yang diamanatkan dalam konstitusi kita yaitu menjadikan koperasi sebagai bangun perusahaan yang tangguh dalam demokrasi ekonomi Indonesia.

## **7. Masalah Lainnya.**

Berbagai persoalan mendasar masih menjadi kendala, antara lain masalah teknologi yang kaya akan keterkaitan, kompatibel dengan ketrampilan masyarakat dan lingkungan, serta sesuai dengan komposisi serta kualitas sumberdaya setempat, dan persoalan infrastruktur seperti transportasi dan sebagainya. Meskipun pemecahan masalah-masalah ini tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan sektor pertanian, namun keberhasilan dalam memantapkan landasan pengembangan bagi sektor pertanian juga sangat tergantung kepada penyelesaian masalah-masalah tersebut.

**Bapak Menteri Pertanian yang saya hormati,  
Saudara-saudara peserta Rakernas yang saya hormati,**

Sekarang saya ingin mengajak Saudara-saudara untuk bersama-sama melihat ke depan; prospek yang akan kita hadapi serta langkah-langkah konkrit yang perlu kita rumuskan dengan baik dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya



dalam menyelesaikan Pelita V yang tinggal dua tahun lagi ini. Oleh karena itu pembahasan saya menjangkau lebih luas dari sekedar pengembangan agro-industri.

Dalam era PJPT II, Pembangunan pertanian berkelanjutan seyogyanya dibentuk oleh kekuatan kompatibilitas pewilayahan dalam kegiatan produksi sektor pertanian dengan sektor industri, baik dalam skala usaha, lokasi maupun jenis komoditas. Dengan demikian, pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dapat merekat, menjalin dan mengisi perbedaan sifat/ciri kegiatan produksi pertanian dan industri, sehingga seluruh mata rantai sistem pertanian berfungsi secara optimal. Kondisi demikian akan dapat memperkokoh keterkaitan ke depan dan ke belakang antara kedua sektor, yang juga berarti hasil produksi pertanian dapat diserap oleh sektor industri dan sebaliknya hasil produksi industri dapat diserap sektor pertanian, sehingga tercipta perubahan yang mendasar dalam struktur ekonomi.

Kerangka strategi pembangunan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan agro-industri yang merupakan bidang singgung antara kedua sektor, merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan, yang antara lain menarik dan mendorong sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, luwes dan efisien menciptakan nilai tambah, meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki pembagian pendapatan.

**Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,**

Uraian di atas menjelaskan kepada kita bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, khususnya pembangunan agro-industri diperlukan penajaman program yang selama ini sudah berjalan dan kita yakini sebagai prioritas yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di sektor pertanian. Di samping itu, evaluasi terhadap berbagai program terobosan yang telah kita galakkan sejak tahun lalu kiranya perlu pula mendapatkan perhatian kita yang sungguh-sungguh.

Belum luput dari ingatan kita bersama ketika menghadapi

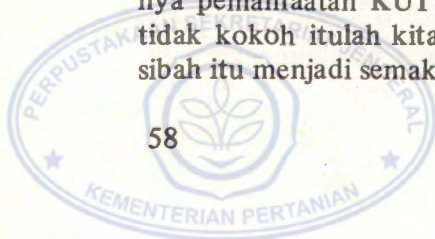


cobaan yang amat sulit dalam mengatasi musibah kekeringan yang berkepanjangan pada tahun yang lalu. Berbagai upaya telah kita laksanakan untuk mengantisipasi dampak kekeringan tersebut. Kini beberapa indikator dalam laporan yang Saudara sampaikan telah diterima dan dari laporan tersebut terungkap hasil dari segala upaya yang telah kita laksanakan terutama dalam musim tanam padi tahun 1991/1992.

Saya ingin menggarisbawahi bahwa akurasi serta kualitas data yang Saudara himpun di lapangan sangat kritis bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mengatasi dampak kekeringan yang kita canangkan. Pada tingkat produksi yang telah kita capai saat ini, deviasi tingkat akurasi data dalam beberapa persen yang kecil sekalipun sudah dapat memberikan dampak yang besar terhadap stabilisasi ekonomi nasional.

Seperti yang pernah kita bahas bersama, waktu luang tersedia untuk mempertahankan laju pertumbuhan rata-rata produksi padi dalam Repelita V, sebagai akibat dari rendahnya tingkat produksi padi dalam dua tahun terakhir ini, hanya tinggal beberapa musim tanam lagi. Ditambah lagi dengan kemungkinan musim kering yang bisa saja akan kita hadapi lagi pada tahun ini, maka himbauan yang ingin saya sampaikan adalah agar kita jangan terlalu cepat berpuas diri.

Pada kesempatan ini saya minta perhatian kita sekalian akan kenyataan bahwa musim kering yang panjang dan terik sebenarnya tidak kita alami pada tahun 1991 saja. Secara berkala, pada tahun 1987, 1982 dan beberapa kali sebelum itupun kita mengalami kekeringan. Namun musibah yang terjadi sebagai dampak kekeringan pada tahun yang lalu sungguh sangat besar. Bagi saya hal itu menunjukkan bahwa di samping kekeringan, sebenarnya sistem produksi padi yang kita bangun selama ini telah mengalami pengendoran. Hal ini juga ditunjukkan oleh kecilnya pertumbuhan produksi padi yang kita capai satu tahun sebelumnya, ditambah lagi dengan sangat menurunnya pemanfaatan KUT oleh para petani. Dalam keadaan yang tidak kokoh itulah kita ditimpa oleh kekeringan, sehingga musibah itu menjadi semakin besar.



Banyak yang dikemukakan orang mengenai sebab-sebab kerapuhan itu. Dari dialog saya dengan para penyuluh senior yang sebagai mahasiswa D-3 baru-baru ini kita terjunkan ke lapangan, saya menarik kesimpulan bahwa rekayasa sosial ekonomi petani melalui kelompok-kelompok sehamparan yang selama ini kita andalkan sebagai basis intensifikasi produksi padi, pada kenyataannya telah goyah. Kebanyakan kelompok tani sehamparan tidak kokoh lagi terbina oleh para kontak tani, sehingga penyusunan RDK dan RDKK yang menjadi kunci dari pemanfaatan KUT tidak dapat dilakukan dengan baik. Temuan dari para mahasiswa D-3 itu menjelaskan mengapa pada saat ini kita sangat jauh dari pencapaian target pembinaan kelompok tani yang sempat kita tetapkan sendiri untuk Pelita V ini.

Hal yang kedua yang sangat memprihatinkan adalah mengendornya semangat dan gairah kerja para penyuluh lapangan kita. Tampaknya, pengalaman para petani yang tidak selalu menyenangkan dengan KUT telah menimbulkan jarak antara mereka dengan para penyuluh. Kalau saja para penyuluh lapangan mendapat dorongan dari posko-posko di tingkat Kecamatan dan Desa maka jarak yang timbul itu pasti akan dapat mereka atasi. Sayangnya, ada tanda-tanda bahwa dorongan ini jarang sekali mereka peroleh.

Berdasarkan kenyataan di atas, kita harus merasa perlu untuk menegakkan kembali semangat dan gairah ujung tombak kita itu. Dalam hubungan ini saya minta beberapa hal dari jajaran pertanian terutama yang bertugas di daerah.

Pertama adalah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan benar mengenai perubahan kebijaksanaan kita tentang kedudukan mereka. Hal ini sangat penting, agar dalam kesulitan menghadapi pekerjaan di lapangan mereka tidak dibingungkan oleh ketidakpastian posisi mereka, termasuk penjenjangan kariernya.

Kedua adalah mengaktifkan posko-posko, baik di tingkat Kabupaten dan terutama di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan memantapkan peran para penyuluh lapangan kita. Ada-



lah sangat wajar apabila semua pihak menuntut para penyuluh itu agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun, adalah juga merupakan kewajiban semua pihak untuk menghargai mereka sesuai dengan prestasi mereka dalam menunaikan tugas itu.

Dalam kaitan ini, saya minta agar seluruh jajaran Departemen Pertanian berupaya sekuat tenaga dalam bulan-bulan mendatang ini sehingga para petani dan penduduk pedesaan yang miskin sumberdaya dapat terhindar dari dampak negatif musim kemarau mendatang.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Dengan alokasi anggaran yang disediakan bagi pembangunan di sektor pertanian untuk tahun ini, maka kita harus dapat menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan berikut: (a) Sejauh mana alokasi anggaran yang tersedia kini dapat mempengaruhi sasaran yang telah kita tetapkan bersama dalam Repeleta V; (b) Program-program mana yang kita andalkan dan patut kita perjuangkan prioritas penyediaan alokasi anggarannya agar landasan pengembangan sektor pertanian yang kita bangun tidak goyah; dan (c) Program-program mana yang secara ekonomi bersifat investasi jangka panjang sehingga dalam kurun waktu yang tersedia alokasi pembiayaannya dapat disesuaikan kembali tanpa mengurangi sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan. Saya mengharapkan bahwa selama rapat kerja ini berlangsung pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan tuntas.

Dalam perspektif jangka pendek, penajaman program terobosan guna menanggulangi masalah kemiskinan perlu terus menerus kita lakukan. Kita telah meyakini bahwa mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pasar, teknologi, modal, dan keahlian. Kita telah meyakini bahwa apabila mereka dapat memiliki akses terhadap program pembangunan pedesaan, maka mereka akan dapat merealisasikan potensi ekonominya yang saat ini masih tersembunyi tersebut.



Atas dasar pemikiran itulah program-program terobosan kita tempuh harus menggunakan tolok ukur ini sebagai alat pemicu. Saudara-saudara yang bekerja di lapangan lah yang secara tepat dapat menjawab pertanyaan: sudahkah mekanisme pelayanan program untuk mereka itu dirancang sesuai dengan keperluan dan kapasitas kemampuan masyarakat miskin? Program terobosan yang bagaimanakah kiranya dapat secara efektif menyentuh sasaran kelompok masyarakat miskin ?

Dalam kaitan ini saya harapkan agar Badan Litbang Pertanian dapat segera menghimpun informasi yang sudah ada mengenai aspek kemiskinan ini sehingga secara tepat dapat memberikan gambaran mengenai profil-kemiskinan masyarakat pedesaan. Informasi yang terhimpun baik sangat diperlukan dalam analisis kebijaksanaan, terutama guna meningkatkan efektivitas program terobosan yang akan kita laksanakan.

Sejauh mana peran lembaga penunjang di pedesaan dapat dikaitkan dengan program terobosan ini? Besarnya peranan sektor-sektor penunjang tersebut terhadap pembangunan di bidang pertanian tentu memberikan berbagai peluang bagi para pelaku di sektor pertanian untuk dapat memacu dan meningkatkan efisiensi, volume usaha maupun rentabilitasnya. Dalam hal ini kita semua telah memahami bahwa beberapa kendala yang masih melekat di dalam mendorong peran sektor finansial telah dicoba untuk dikendurkan, misalnya dengan langkah-langkah deregulasi (Pakto, Pakdes dan lainnya).

Jika Sektor finansial dengan sistemnya ditunjang oleh iklim ekonomi yang positif, pada dasarnya akan mempunyai potensi yang besar di dalam melakukan peran, terutama bagi pembangunan pertanian. Ia akan menjadi semacam "mata rantai" yang diharapkan mampu untuk menghubungkan sektor usahatani dengan sektor industri (agro-industri) yang pada gilirannya akan mampu menimbulkan iklim investasi yang positif sehingga akan membawa peningkatan kepada masalah-masalah efisiensi maupun distribusi.

Ada dua prinsip yang harus selalu diperhatikan di dalam

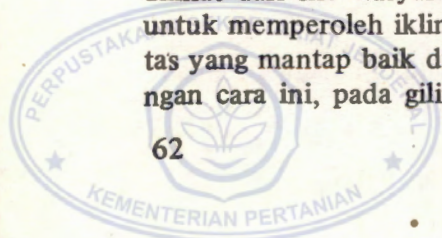


konsepsi kebijaksanaan sektor finansial, terutama dalam hubungan dengan pembangunan sektor pertanian, yaitu (a) prinsip manajemen dan (b) prinsip "agent of development". Di dalam prinsip pertama, sektor ini diharapkan dapat berfungsi dengan wajar sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik berdasarkan kaidah-kaidah likuiditas, keamanan dan kemandirian. Jika demikian, maka sektor finansial diharapkan dapat tumbuh dan berkembang tanpa tergantung dari dana-dana lain, misalnya pemerintah. Sementara itu, prinsip ke dua lebih mengutamakan upaya untuk mengejar pertumbuhan sektor yang didukungnya, misalnya sektor pertanian. Berdasarkan prinsip ini, kemampuan manajemen maupun kemandirian bukanlah merupakan prioritas utama.

Berdasarkan kedua prinsip di atas, agaknya merupakan tantangan bagi kita semua untuk mencari arah di dalam sektor finansial yang mampu memberikan dukungan optimal, baik bagi kelestarian sektor tersebut maupun bagi sektor yang didukungnya. Dengan sudah mulai bergesernya fungsi pemerintah dari pelaku utama pembangunan menjadi perakit iklim yang menggairahkan pembangunan oleh masyarakat sendiri, maka sudah sewajarnya apabila kita berupaya semakin keras untuk membangkitkan kreativitas dan kewiraswastaan masyarakat pedesaan.

**Hadirin yang saya hormati,**

Langkah terobosan untuk jangka pendek lainnya adalah berbagai peluang untuk mengefektifkan serta mengefisiensikan bentuk-bentuk kelembagaan seperti "contract farming", berupa upaya-upaya kelembagaan di dalam mendorong dan mengusahakan kerjasama saling menguntungkan antara petani dengan pabrik pengolah melalui pola kerjasama yang transparan. Kerja sama ini harus dapat mendorong dan mengusahakan terjadinya spesialisasi produksi berdasarkan keuntungan komparatif baik dilihat dari sisi masyarakat petani maupun wilayah; dan usaha untuk memperoleh iklim harga yang merangsang dengan stabilitas yang mantap baik di tingkat petani maupun konsumen. Dengan cara ini, pada gilirannya tentu akan merangsang para pe-

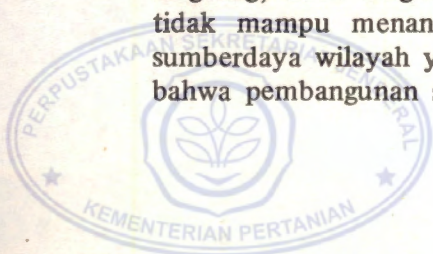


tani dalam kepastian usaha, tercapainya skala usaha ekonomis sehingga stabilitas pasokan dan harga produk senantiasa terjamin.

Dalam pada itu, situasi perkembangan perekonomian internasional akan segera mampu menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional. termasuk didalamnya pada sektor pertanian dalam berbagai kegiatannya, mulai dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya produksinya sampai pada kegiatan distribusi, pemasaran dan perdagangannya. Kelambatan antipasi terhadap setiap perubahan yang terjadi termasuk di dalamnya proses globalisasi, mengakibatkan tidak dapat dihindarinya secara dini dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan tersebut, ataupun tidak mempunya menangkap manfaat positif yang dibawanya. Kemampuan untuk memberikan respons yang tepat pada saatnya akan sangat bergantung pada bagaimana upaya-upaya kesiapan diri menyosong perubahan-perubahan mendasar tersebut.

Pembangunan pertanian berkelanjutan pada PJPT II bukan lagi sekedar bertumpu pada persoalan produksi semata-mata, akan tetapi berwawasan mencakup peningkatan pendapatan dan mutu kehidupan yang lebih baik. Dua aspek yang dipandang sangat erat kaitannya dengan persoalan tersebut adalah (a) wawasan agro-ekosistem dan (b) wawasan wilayah/regional. Walaupun wawasan Agro-ekosistem merupakan sesuatu pengelolaan yang kompleks dan rumit, akan tetapi ciri-ciri spesifik terpenting menyangkut empat sifat pokok. Empat sifat pokok tersebut adalah pemerataan, keberlanjutan, kestabilan dan produktivitas.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan wilayah mempunyai sentuhan-sentuhan khusus untuk lebih memperhatikan aspek-aspek sumberdaya dasar. Dampak-dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya pemanfaatan sumberdaya wilayah tersebut pada dasarnya dapat bersifat langsung, tidak langsung maupun terimbas. Manakala wilayah tidak mampu menangkap dampak ganda dari pemanfaatan sumberdaya wilayah yang bersangkutan, sangat dikhawatirkan bahwa pembangunan sumberdaya semacam itu akan lebih me-



rupakan sekedar eksploitasi sumberdaya wilayah, dimana wilayah yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk menangkap manfaat yang timbul dari padanya. Inilah awal timbulnya "kebocoran" manfaat wilayah, yang biasanya akari diikuti oleh mengalirnya sumberdaya produktif ke luar wilayah yang bersangkutan. Uraian di atas menunjukkan betapa mendesaknya untuk memasukkan wawasan wilayah ke dalam persoalan pengelolaan sumberdaya dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

Demikianlah, telah kita ikuti bersama bahwa tugas yang kita hadapi tidaklah ringan. Akan tetapi, saya merasa yakin bahwa seluruh jajaran Departemen Pertanian akan mampu menggalakkan kembali semangat yang melahirkan swasembada dahulu guna menjawab segala tantangan tadi. Dengan demikian, semua pelaku pada sektor pertanian akan tetap memainkan peranan sangat strategis dalam memasuki era lepas landas Bangsa.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Menteri Muda Pertanian**

ttd.

**Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah**



**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI BAGI PEDESAAN DALAM  
RANGKA PENGEMBANGAN  
AGRO INDUSTRI**

**DEPARTEMEN PERTANIAN**

**1992**





# PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BAGI PEDESAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN AGRO-INDUSTRI<sup>1)</sup>

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah

## I. PENDAHULUAN

Dalam struktur ekonomi Indonesia, sektor pertanian, Indonesia masih memegang peranan penting. Walaupun kontribusinya terhadap GDP hanya sekitar 21,1 persen (Tahun 1988), namun peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja masih sekitar 55,6 persen. Pada akhir Pelita V sektor pertanian diharapkan dapat menyerap 42,6 juta tenaga kerja atau sekitar 49,9 persen dari total tenaga kerja yang terserap. Terhadap ekspor, sektor pertanian menyumbang sekitar 17,4 persen (Tahun 1988) dari seluruh devisa yang diperoleh.

Melihat peranannya seperti di atas, kemampuan sektor pertanian perlu terus ditingkatkan untuk mencapai suatu sektor yang tangguh. Ketangguhan sektor pertanian dicirikan oleh: (a) mampu memanfaatkan segala sumberdaya secara optimal, (b) mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang dihadapi, (c) mampu menyesuaikan pola dan struktur produksi mengimbangi perubahan permintaan masyarakat dan perubahan teknologi, dan (d) mampu berperan positif dalam pembangunan wilayah, melalui peningkatan produksi, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja, serta perbaikan lingkungan hidup.

Dalam seluruh rangkaian pembangunan pertanian yang dilaksanakan, pengembangan produksi komoditas pertanian me-

---

1) Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Menggerakkan Usaha Ekonomi Rakyat Dalam Rangka Pembangunan Daerah Sebagai Bagian dari Pembangunan Nasional", DPP Golkar, Bukit Tinggi, 10-12 Juni 1991.



nempati posisi sentral. Pengembangan produksi ini diarahkan untuk mempertahankan swasembada pangan, meningkatkan volume ekspor, menyediakan bahan baku industri dan kebutuhan lain seperti bahan pakan ternak dan bibit. Dalam pengembangan setiap komoditas, dipakai wawasan agribisnis yang mana selain dicapainya peningkatan produksi, pendapatan petani juga diharapkan dapat meningkat.

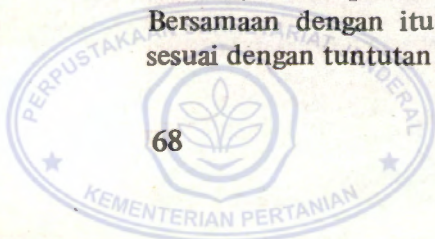
Pengembangan agribisnis secara luas menyangkut juga pengembangan agro industri yang merupakan diversifikasi vertikal dari agribisnis diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, menganekaragamkan bahan pangan dan komoditas ekspor, serta meningkatkan pendapatan penduduk pedesaan.

Untuk mencapai sasaran pengembangan agribisnis dan agro-industri di pedesaan, pengembangan teknologi yang tepat guna memegang peranan kunci. Selanjutnya teknologi tersebut harus dapat disebarluaskan dan akhirnya diterapkan oleh petani di pedesaan.

Bertitik tolak dari argumen di atas, makalah ini bertujuan untuk membahas konsepsi pengembangan teknologi pertanian di pedesaan serta proses penerapannya. Pembahasan didahului dengan konsepsi pengembangan komoditas pertanian dan agro-industri.

## II. PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN DAN AGRO-INDUSTRI

Seperti telah disebutkan terdahulu, pengembangan komoditas merupakan komponen pokok dalam pembangunan pertanian. Pengembangan tersebut menyangkut aspek kuantitas maupun kualitas. Kualitas produksi komoditas pertanian perlu terus ditingkatkan mengingat permintaannya yang semakin tinggi baik untuk konsumsi dalam negeri, kebutuhan bahan baku industri, bahan pakan ternak maupun untuk keperluan ekspor. Bersamaan dengan itu kualitasnya juga perlu terus diperbaiki sesuai dengan tuntutan pasar.



Berdasarkan orientasi pasarnya, komoditas pertanian diarahkan untuk memenuhi berbagai tujuan. *Pertama*, terutama beras, beberapa komoditas palawija dan hortikultura pengembangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri sehingga tercapai swasembada. *Kedua*, beberapa komoditas seperti tanaman perkebunan diarahkan untuk keperluan ekspor. *Ketiga*, sebagian komoditas pertanian juga dimaksudkan sebagai bahan baku industri. Hal ini terutama diprioritaskan untuk komoditas yang memiliki kaitan ke depan yang kuat.

Dikaitkan dengan pembangunan wilayah, pengembangan komoditas dan pembangunan pertanian pada umumnya diharapkan sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah. Pengembangan komoditas di suatu wilayah didasari oleh pertimbangan keunggulan komparatif sesuai dengan potensi fisik dan prasarana ekonomi yang telah berkembang di daerah tersebut. Pewilayahan komoditas tersebut menimbulkan terjadinya spesialisasi yang akhirnya mendorong aktivitas perdagangan antar wilayah. Dengan adanya spesialisasi produksi, penggunaan sumberdaya menjadi lebih efisien.

Dasar pembagian wilayah komoditas secara teknis adalah zona agro ekosistem. Berdasarkan konsep tersebut, setiap wilayah administratif dapat dibagi-bagi lagi ke dalam zona agro ekosistem yang lebih spesifik yaitu lahan sawah beririgasi, lahan sawah tadah hujan, lahan pasang surut/rawa, dan lahan kering. Untuk setiap zona tersebut, alternatif komoditas yang harus dikembangkan sudah lebih spesifik. Namun demikian azas skala ekonomi pada tingkat wilayah dalam pengembangan komoditas tersebut tetap diperhatikan.

Berkaitan dengan pewilayahan komoditas di atas, peranan pulau Jawa dalam menghasilkan produksi pangan masih relatif tinggi. Untuk padi, Jawa menyumbang produksi sebesar 61 persen, sementara untuk jagung, kedelai dan ubi-kayu masing-masing adalah 62,5 persen, 56,7 persen dan 62,7 persen. Dalam jangka panjang ketergantungan terhadap produksi pangan di Jawa ini perlu dikurangi dengan mengembangkan prasarana dan



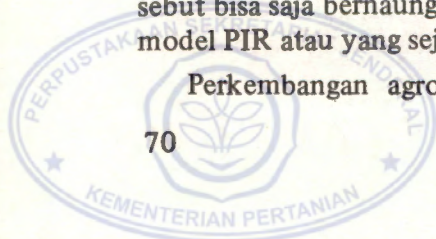
teknologi di luar Jawa terutama untuk lahan pasang surut/ rawa dan lahan kering.

Wawasan lain dalam pengembangan komoditas adalah bahwa produksi komoditas pertanian merupakan suatu sistem agribisnis. Dengan konsep ini, kegiatan produksi pertanian harus dipandang sebagai suatu kegiatan usaha yang mampu memberikan keuntungan dan pendapatan bagi pengelolanya (petani, nelayan atau pengusaha). Produksi komoditas juga harus dilakukan dengan memperhatikan azas efisiensi yang memungkinkan pengusaha mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasaran internasional.

Dilihat dari aspek diversifikasi secara vertikal, pengembangan komoditas mencakup pula aspek agro-industrinya. Kegiatan ini mengolah komoditas pertanian sebagai bahan baku menjadi bahan olahan jadi atau setengah jadi. Integrasi produksi komoditas pertanian dengan agro-industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, menganeka ragamkan bahan makanan dan produk ekspor dan akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan pemasaran dan pengolahan kedelai mampu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja sebanyak masing-masing 20,9 persen, dan 36,7 persen di atas kegiatan produksi saja. Dilihat dari potensi permintaan, pengembangan agro-industri juga menunjukkan prospek yang cerah terutama untuk pangan. Dengan meningkatnya pendapatan, permintaan bahan makanan olahan semakin meningkat pula. Hal ini terjadi baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Agar bisa dilakukan dan dinikmati oleh penduduk pedesaan, perusahaan agro-industri harus didorong untuk tumbuh di pedesaan dengan model industri rumah tangga. Dengan demikian, sebanyak mungkin penduduk pedesaan dapat terlibat tanpa melepaskan prinsip-prinsip efisiensi termasuk skala usaha. Untuk pertimbangan efisiensi, usaha industri rumah tangga tersebut bisa saja bernaung di bawah suatu perusahaan besar dengan model PIR atau yang sejenisnya.

Perkembangan agro-industri yang berkelanjutan (sustaina-



ble) juga menuntut persyaratan-persyaratan tertentu pada sisi produksi pertanian sebagai bahan baku. Pertama, untuk menjamin jumlah bahan baku yang memenuhi suatu skala ekonomi, produksi bahan baku harus dilakukan dalam suatu hamparan yang terpadu. Kedua, kelanggaran produksi antrar musim sedapat mungkin juga dipertahankan. Hal ini menuntut teknologi produksi maupun penyimpanan yang mampu menjaga kelanggaran tersebut.

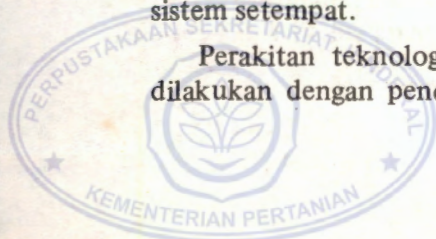
### III. KONSEPSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN.

Keberhasilan pengembangan komoditas pertanian tidak dapat dilepaskan dari pengembangan teknologi. Dalam kaitan ini pentingnya kegiatan penelitian baik penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan paket-paket teknologi, penelitian yang menghasilkan bahan untuk menyusun paket kebijaksanaan ataupun penelitian yang menghasilkan informasi bagi pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri.

Penelitian dikatakan berhasil apabila hasil penelitian tersebut telah digunakan oleh masyarakat/pemerintah dan memberikan manfaat bagi penggunaan hasil penelitian tersebut. Dalam hal ini hasil penelitian haruslah secara teknis dapat diterapkan, secara ekonomis menguntungkan secara sosial diterima masyarakat dan memberikan dampak minimum terhadap lingkungan. Penelitian dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang diarahkan untuk menunjang pembangunan pertanian.

Kondisi pertanian dan pedesaan yang bervariasi antar wilayah menuntut pemilihan dan perakitan teknologi yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan setempat. Dalam kaitan ini perakitan teknologi haruslah bersifat tepat guna dalam arti paket teknologi yang mampu meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, peningkatan produksi, mutu hasil dan meningkatkan nilai tambah. Untuk itu penerapan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi agro ekosistem setempat.

Perakitan teknologi yang spesifik lokasi (agro ekosistem) dilakukan dengan pendekatan sistem usahatani. Dengan demi-



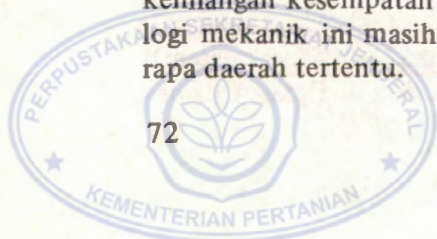
kian paket yang direkomendasikan bersifat terpadu memperhatikan kaitan antar berbagai komponen dalam sistem usahatani yang unik. Hal ini juga menghindari kegagalan paket teknologi karena tidak sesuai atau bertentangan dengan tatanan sistem yang sudah mapan.

Kondisi pertanian dan pedesaan di Indonesia cenderung masih bersifat subsistem, tradisional dan berskala kecil. Oleh karenanya teknologi tepat guna tersebut harus merupakan suatu paket teknologi yang berciri skala kecil, mempunyai daya serap tenaga kerja besar dan memerlukan investasi yang relatif kecil.

Macam teknologi akan memberikan pengaruh terhadap proses produksi. Pengaruh tersebut dapat berupa : (a) teknologi yang meningkatkan produktifitas, (b) teknologi yang menghemat faktor produksi atau menurunkan faktor produksi, (c) teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hasil, nilai tambah dan membuka peluang pasar baru, serta (d) rekayasa sosial yang berupa perangkat lunak sebagai penggerak kegiatan berproduksi dan penerapan teknologi, seperti pengorganisasian, kelembagaan dan pengelolaan.

Dalam penciptaan teknologi yang meningkatkan produktifitas, dirasakan pentingnya peningkatan kemampuan dan rekayasa genetik, dan teknologi budaya. Sebagai contoh pada komoditi padi penciptaan varietas unggul baru diperlukan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap varietas varietas tertentu. Pada palawija rakitan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktifitas komoditi, terutama komoditi-komoditi yang masih menggantungkan kepada impor seperti kedele.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, teknologi mekanik juga perlu terus dikembangkan. Penerapannya sudah sangat mendesak terutama di daerah-daerah dengan intensitas tanam yang tinggi namun dihadapkan dengan kelangkaan tenaga kerja. Untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kehilangan kesempatan kerja buruh tani, pengembangan teknologi mekanik ini masih perlu dilakukan secara selektif di beberapa daerah tertentu.



Tidak kalah pentingnya adalah penciptaan teknologi yang bersifat rekayasa sosial dalam menciptakan suatu sistem pengorganisasian, kelembagaan dan pengelolaan usahatani. Sistem pengelolaan seperti Insus, Supra Insus dan Opsus telah memperlihatkan hasilnya dalam merangsang produksi tanaman pangan. Di bidang perkebunan telah pula diberlakukan sistim Tebu Rakyat (TRI) dan PIR Bun.

Penerapan teknologi dan upaya peningkatan produksi haruslah pula memperhatikan azas-azas kelestarian lingkungan. Contoh yang jelas paket teknologi yang berwawasan lingkungan adalah Pemberantasan Hama Terpadu (PHT). Dalam pendekatan ini, pengganggu tanaman dapat dikurangi sekecil mungkin tanpa merusak kelestarian sumberdaya biotik.

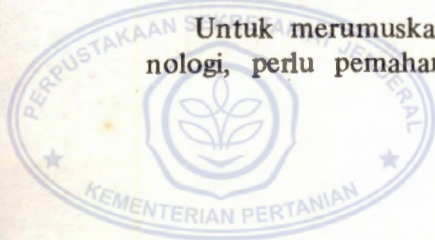
Dari segi produksi, sektor pertanian akan terus dituntut untuk meningkatkannya. Dalam penyediaan lahan sebagian lahan kering menjadi kritis akibat pendayagunaan untuk tanaman semusim, sehingga perlunya untuk peningkatan upaya konservasi tanah dan air. Di sisi lain pemakaian input produksi yang tinggi seperti pada hortikultura mengingatkan kembali akan dampak terhadap kelestarian dan lingkungan. Pentingnya perhatian terhadap masalah kelestarian sumberdaya dan lingkungan akan dapat berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan produksi baik di waktu sekarang maupun di masa mendatang.

#### **IV. STRATEGI ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

##### **Teknologi dan Penggunaannya**

Walaupun masih perlu peningkatan, penelitian telah terbukti mampu menghasilkan paket teknologi yang potensial. Untuk bisa digunakan oleh petani dan pengguna lainnya, paket teknologi yang telah terakit perlu disebarluaskan. Keberhasilan proses alih teknologi akan menentukan sampai sejauhmana teknologi dapat mencapai sarannya.

Untuk merumuskan langkah-langkah operasional alih teknologi, perlu pemahaman siapa pengguna teknologi. Secara



umum pengguna teknologi terdiri atas petani/nelayan di pedesaan dan pengusaha besar di perkotaan. Petani dan nelayan sendiri mempunyai karakteristik yang bervariasi yang menentukan respon yang berbeda terhadap adopsi teknologi baru. Ini berarti bahwa penyediaan teknologi harus memperhatikan bukan hanya keragaman agro ekosistem tetapi juga keragaman karakteristik pengguna. Ada pendapat yang mengatakan bahwa teknologi sudah banyak yang tersedia, tetapi tidak sampai kepada pengguna. Hal ini menyangkut belum terpecahkannya masalah komunikasi antara peneliti dengan pengguna teknologi.

Masalah yang sering terjadi pula adalah bahwa teknologi yang dirakit tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyangkut kelayakan teknologi, baik dari segi teknis maupun sosial-ekonomi. Ketiga kriteria kelayakan itu perlu selalu diperhatikan dalam tahap pengembangan suatu paket teknologi. Perumusan paket teknologi yang terlalu umum akan memperlambat proses alih teknologi tersebut. Untuk mempercepat alih teknologi itu diperlukan mediator antara peneliti sebagai pencipta teknologi dengan pengguna teknologi dan didukung oleh kelembagaan yang terkait.

### **Integrasi antara Penelitian, Penyuluhan dan Pengguna Teknologi**

Paket teknologi yang dirumuskan lembaga penelitian ditujukan untuk mendukung program pembangunan pertanian. Oleh sebab itu, hasil penelitian harus segera disampaikan kepada pengguna, terutama petani dan nelayan. Namun demikian, sampai saat ini paket teknologi yang dihasilkan umumnya tidak segera dapat diadopsi petani yang berakibat pada terjadinya kesenjangan antara paket teknologi yang dihasilkan dengan paket yang diterapkan petani. Pada giliran berikutnya hal ini berakibat pada timbulnya kesenjangan produktivitas hasil di tingkat petani dan di lembaga penelitian.

Salah satu faktor penting yang diduga menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah masih kurangnya keterpaduan antara kegiatan penelitian dengan penyuluhan. Kekurangan keterpadu-



an itu bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, hasil penelitian umumnya disampaikan dalam bentuk tulisan ilmiah, sedangkan penyuluh memerlukan sumber informasi yang lebih mudah untuk dicerna. Kedua, kekurangan keterpaduan itu bisa juga dilihat dari segi relevansi antara teknologi yang diciptakan dengan kebutuhan pengguna.

Misalnya, teknologi yang diciptakan sering masih berupa komponen, sedangkan yang dibutuhkan oleh pengguna adalah paket teknologi yang sesuai dengan agro ekosistem dan kemampuan petani/nelayan. Dari contoh-contoh ini dapat dirumuskan bahwa kegiatan pengembangan penelitian masih perlu ditingkatkan. Kegiatan pengembangan penelitian itu seyogyanya melibatkan kerjasama antara peneliti, penyuluh dan pengguna.

Melalui kerjasama tersebut peneliti akan memperoleh umpan balik dari penyuluh dan pengguna dalam merumuskan program penelitiannya. Dengan demikian diharapkan bahwa hasil penelitian itu akan sesuai dengan kebutuhan dan pada gilirannya proses alih teknologi itu akan berjalan lebih cepat. Pelembagaan kerjasama ini tentu memerlukan kesepakatan semua lembaga yang terkait.

Karena umumnya pengguna teknologi itu berada di daerah (pedesaan), maka secara logis kegiatan pengembangan penelitian sebagian besar harus berada di tingkat lokal (misalnya kabupaten). Hal ini menuntut agar semua institusi yang terkait di daerah harus mempunyai persepsi yang sama tentang urgensi kegiatan pengembangan penelitian itu dalam mendorong perekonomian daerah itu.

Beberapa langkah penting dalam pengembangan penelitian itu antara lain: (1) Identifikasi masalah kebutuhan teknologi pada berbagai agro ekosistem, (2) Mengevaluasi dan merekayasa hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan lokal, (3) Penyebarluasan hasil penelitian, seperti publikasi, demonstrasi dan temu lapang, (4) Mencari bentuk kelembagaan untuk memperbaiki teknik penyampaian hasil penelitian .



## Faktor-faktor Pendorong Adopsi Teknologi

Masalah adopsi teknologi adalah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait satu dengan yang lain. Selain dipengaruhi faktor fisik dan sosial-ekonomi, juga dipengaruhi faktor psikologis, seperti tingkat kepercayaan tentang nilai tambah yang diperoleh dari penggunaan teknologi baru tersebut. Beberapa faktor penting yang diduga merupakan pendorong terhadap adopsi teknologi adalah sebagai berikut :

### (a) *Kelembagaan*

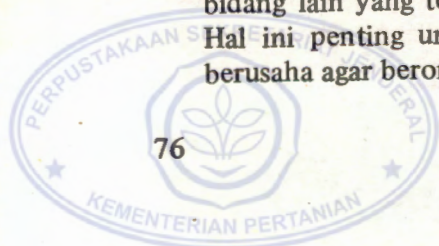
Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa banyak lembaga yang terlibat dalam alih teknologi itu. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan alih teknologi itu diperlukan *kesamaan persepsi* dari semua lembaga yang terkait tentang urgensi penggunaan teknologi itu dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah itu. Selain itu, dengan adanya kesamaan persepsi tersebut, pada gilirannya akan muncul motivasi untuk bekerja demi kepentingan umum, tidak hanya kepentingan individu. Penekanan masalah itu begitu penting mengingat masyarakat Indonesia mempunyai kondisi sosial ekonomi yang beraneka ragam antar daerah.

### (b) *Karakteristik teknologi*

Hal penting yang ditonjolkan dari karakteristik teknologi ini adalah kelayakannya. Layak dalam arti teknis, ekonomi dan sosial. Jika salah satu dari unsur kelayakan ini tidak dipenuhi sulit diharapkan proses alih teknologi itu berjalan dengan cepat, bahkan tidak diadopsi sama sekali.

### (c) *Pengetahuan/ketrampilan pengguna*

Petani, pengguna teknologi di pedesaan umumnya mempunyai pendidikan atau ketrampilan rendah. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyuluhan, tidak hanya dalam hal pengetahuan cara menggunakan teknologi itu, tetapi juga dalam bidang lain yang terkait pada perekonomian rumah tangga. Hal ini penting untuk mendorong *motivasi mereka* dalam berusaha agar berorientasi komersial, bukan subsisten.



(d) *Pasar*

Penggunaan teknologi akan meningkatkan produktivitas atau menghasilkan komoditi baru. Ini berarti bahwa agar dampak teknologi itu meningkatkan nilai tambah, diperlukan dukungan pasar yang efisien.

(e) *Kredit*

Umumnya petani/nelayan di Indonesia tergolong ekonomi lemah. Ini berarti bahwa agar mereka mampu meng-adopsi teknologi baru diperlukan tambahan modal kerja mereka. Biasanya penggunaan teknologi baru menuntut modal yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi tradisional.

## V. PENUTUP

Untuk meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja di pedesaan, pengembangan komoditas pertanian memegang peranan kunci. Pengembangan tersebut dilakukan dalam kerangka pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan komparatif dari masing-masing wilayah tersebut.

Pengembangan komoditas di atas perlu diintegrasikan pula dengan kegiatan agro industri di pedesaan. Selain meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja dan pendapatan, peningkatan kegiatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan pasar. Misalnya untuk pangan, permintaan bahan olahan semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di pasar dunia.

Untuk mendukung pengembangan komoditas, teknologi dikembangkan dalam konteks sistem usahatani sesuai dengan kondisi agro ekosistem di masing-masing daerah. Paket teknologi yang dikembangkan juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mempertahankan sustainability dari sektor pertanian.

Selain proses perakitannya, proses alih teknologi dari peneliti ke pengguna juga perlu penyempurnaan. Untuk mempercepat proses alih teknologi tersebut perlu kesamaan persepsi di antara semua lembaga yang terkait tentang peranan pengem-



bangun penelitian dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Kesamaan persepsi tersebut akhirnya harus tercermin dalam bentuk integrasi pihak peneliti, penyuluh dan pengguna dalam pengembangan penelitian. Kerjasama tersebut seyogyanya terjadi sampai di tingkat lokal (kabupaten atau propinsi).

Jakarta, Juni 1991

Menteri Muda Pertanian

ttd.

Prof. Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah







